

KORAN
DIGITAL

radar.

EDISI SELASA
10 OKT 2023

MEDIA

T E R D E P A N



RAZIA ODOL DI SIMPANG 3 PERDAU, DISHUB AMANKAN 41 UNIT KENDARAAN



PELATIHAN PKMN BAGI NAKES, UPAYA TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU & BAYI



RAZIA ODOL DI SIMPANG 3 PERDAU, DISHUB AMANKAN 41 UNIT KENDARAAN

SANGATTA - Dinas Perhubungan Kutai Timur (Dishub Kutim) bekerja sama dengan personel dari Satuan Lalu-lintas (Satlantas) Polres Kutim kembali menggelar operasi razia bagi kendaraan angkutan barang yang masih sering ditemukan melakukan muatan melebihi kapasitas yang ditentukan atau Over Dimension/Overloading (ODOL).

Tidak tanggung-tanggung, razia yang berlangsung di Simpang Tiga Perdau, poros Bengalon-Muara Wahau pada Sabtu (07/10/2023) lalu, 15 personel gabungan yang ditugaskan dalam operasi ini mengamankan sebanyak 41 unit kendaraan angkutan barang. Sebagian besar melakukan pelanggaran berupa muatan berlebihan, over dimensi, serta kelengkapan surat yang sudah habis masa berlakunya.

Kepala Dishub Kutim Joko Supto melalui Kepala Seksi Keselamatan, Awang Adi Juni Astara melalui sambungan telepon mengatakan, razia kali ini masi

terfokus terhadap penanganan kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas maupun over dimensi yang melintas di wilayah Kutim. "Selain bisa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, muatan berlebihan juga menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, makanya kami terus gencar melakukan razia ini," ujarnya.

Selain itu, dirinya mengimbau kepada pemilik kendaraan yang mengubah dimensi baknya tidak sesuai standar, agar segera diubah, mengingat, selain melanggar aturan, dengan mengubah dimensi kendaraan tidak sesuai regulasi yang ditetapkan, maka saat akan melakukan proses perpanjangan uji kelayakan kendaraan dipastikan tidak akan lolos uji.

"Jangan hanya berpikir keuntungan semata, namun lalai terhadap keselamatan diri maupun orang lain," pungkasnya.

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari



Dra. Nina Dewi
MAP saat mem-
buka Pelatihan
Dasar Manaje-
men Bencana

PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA BPSDM KALTIM DIKUTI 60 PESERTA

SAMARINDA - Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam penanggulangan bencana, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Pelatihan Dasar Manajemen Bencana pada Senin (9/10/2023), di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim, Apriyana Rachmawati mengatakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana diikuti oleh 2 angkatan berjumlah 60 peserta selama 4 hari secara klasikal (tatap muka).

"Jumlah peserta 60 orang terdiri dari 30 orang di Angkatan 1, dan 30 orang di Angkatan 2 yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan Bencana di Provinsi Kaltim," ujarnya.

Melalui pelatihan ini dapat meningkatkan Kapasitas SDM dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana sep-

erti yang tertuang dalam PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Disebutkan, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi terjadi bencana.

"Selama mengikuti pelatihan, peserta juga diwajibkan untuk menyampaikan evaluasi terhadap materi, pelaksanaan dan fasilitator," pintanya

Dalam sambutan sekaligus membuka acara, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengatakan pentingnya manajemen bencana tidak dapat diabaikan.

"Di seluruh dunia, kita sering kali dihadapkan pada berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga bencana buatan manusia seperti kecelakaan industri," ujar Nina.

Oleh sebab itu menurut Nina, mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan

yang tepat dalam manajemen bencana adalah langkah yang bijak untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat.

"Dengan ini Pelatihan Dasar Manajemen Bencana secara resmi saya buka," ujar Nina.

Diketahui, narasumber Pelatihan Dasar Manajemen Bencana kali ini, berasal dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, dan Widyaiswara BPSDM Kaltim.

Selain peserta acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno, Kepala BPBD, Agus Tianur, Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Agus Rubiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU, Riviana Noor, Pejabat Administrator, Widyaiswara, Pejabat Pengawas dan Analis Bangkom di Lingkungan BPSDM Kaltim. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
GOV. KALIMANTAN



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Pelatihan
PKMN tingkat-
kan kualitas
pelayanan ibu
dan bayi baru
lahir. (istimewa)

PELATIHAN PKMN BAGI NAKES, UPAYA TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU & BAYI

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pelatihan penanganan kegawatdaruratan bagi dokter umum, bidan dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Berau sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

"AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hasil survei penduduk antara sensus (SUPASI) 2015, AKI di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Muallimin, Jumat (6/10/2023).

Menurut Jaya, salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi adalah komplikasi yang terjadi pada saat masa kehamilan, persalinan dan nifas.

Komplikasi tersebut dapat dicegah dan di-

tangani bila tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini, memberikan pertolongan pertama, melakukan tindakan stabilitas pasien, dan merujuk ke rumah sakit bila perlu.

"Untuk itu, kami mengadakan pelatihan PKMN yang komprehensif dan tepat sasaran bagi tenaga kesehatan di Fasyankes primer dari Kabupaten Berau," ujarnya.

Ditambahkan Jaya, pelatihan ini meliputi teori dan praktik tentang penggunaan partograf, manajemen aktif kala II, resusitasi neonatus, pencegahan infeksi, dan rujukan efektif.

Ia berharap pelatihan PKMN tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Berau.

"Kami mengapresiasi kerjasama antara Dinas Kesehatan Kaltim dengan Balai Pengembangan Pendidikan Kesehatan (Bapelkes) Samarinda dalam penyelenggaraan pelatihan ini," pungkasnya. **(nit/adv/dinkes)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
GO CUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Muallimin. (Istimewa)

Dinkes Kaltim : Berikan Bayi ASI Eksklusif Guna Cegah Stunting

SAMARINDA- Pemberian ASI (air susu ibu) eksklusif selama enam bulan pertama merupakan salah satu upaya dalam pencegahan bayi stunting. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Muallimin.

"ASI eksklusif artinya bayi hanya mendapatkan ASI tanpa tambahan susu atau makanan lain, termasuk susu kental manis yang tidak baik untuk kesehatan bayi," ungkap Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Senin (9/10/2023).

Ia juga menjelaskan, ASI sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

"ASI mengandung protein, lemak, karbo-

hidrat, vitamin, mineral, dan zat untuk kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit," ujarnya.

Sehingga, Jaya mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Selain itu, juga mengimbau para calon pengantin untuk mengikuti sekolah calon ibu. Karena para calon ibu akan mendapatkan ilmu tentang cara menyusui yang benar, manfaat ASI, dan cara mengatasi masalah dalam menyusui.

"ASI eksklusif adalah investasi masa depan bagi anak kita," tutup Jaya. **(nta/adv, Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
D3 GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



kucing peliharaan juga wajib melakukan vaksin untuk cegah penyakit zoonosis. (Istimewa)

BAHAYA PENYAKIT ZONOSIS, JAYA MEMINTA HEWAN PELIHARAAN DIVAKSIN

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersinergi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim melakukan vaksinasi rutin agar masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis.

"Kami mengingatkan masyarakat agar mewaspadaikan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing.

Sedangkan untuk penularan zoonosis, dapat menular melalui tiga cara yaitu langsung, tidak langsung, dan konsumsi.

"Beberapa penyakit zoonosis itu, yakni rabies, antraks, dan leptospirosis," ujarnya.

Dinkes Kaltim tengah menggenapkan vaksinasi terhadap anjing liar dan hewan peliharaan lainnya, guna menjadikan wilayah tersebut bebas dari penyakit rabies.

"Kami pastikan anjing liar divaksin karena mereka berpotensi menularkan rabies kepada manusia," kata Jaya.

Kendati demikian, hewan peliharaan lainnya pun wajib divaksinasi termasuk kucing. Karena kucing jika terkena rabies juga bisa menyebabkan gejala yang sama dengan anjing. Dan hewan lainnya juga perlu mendapatkan vaksin adalah kera.

Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk segera membersihkan luka gigitan hewan dengan

air mengalir dan sabun.

"Jangan sampai virus rabies masuk ke dalam tubuh. Segera periksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti rabies," ucapnya.

Jaya meminta masyarakat yang memiliki hewan peliharaan sebagai binatang kesayangan dan merawatnya dengan baik. Vaksin untuk hewan peliharaan disediakan secara gratis seperti yang dilakukan untuk sapi dan kerbau.

"Di Kaltim, ada penyakit zoonosis lain yang berasal dari sapi dan kerbau, yaitu anthrax. Kita sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk penyakit zoonosis," pungkasnya.

(Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
D3 GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

REMBUK STUNTING, TINGKATKAN SINERGITAS PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

Kepala Dinas
Kesehatan
Kaltim Dr. Jaya
Muallimin. (Me-
dia Kaltim)

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rembuk stunting tingkat provinsi tahun 2023 untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka stunting di wilayah setempat.

"Kami melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021," kata Jaya, di Hotel Mercure, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, dinas terkait dalam penanganan stunting yakni Dinas kesehatan Kaltim, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Tanaman Pangan.

Ia menjelaskan, dalam rembuk stunting itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim. Dinas kesehatan Kaltim berlaku sebagai koordinator untuk Tim Pengendali Penyakit dan Penye-

hatan Lingkungan (TPPS) yang berkoordinasi dengan kepala daerah dari sepuluh kabupaten dan kota se-Kaltim.

Salah satu intervensinya adalah sensitif terhadap lingkungan, rumah sehat layak huni yang disana ada sanitasi yang baik, ketersediaan air yang menjadi urusan dari Dinas PUPR.

Kemudian, terkait keluarga yang harus dibantu melalui program keluarga harapan harus punya kartu BPJS yang menjadi urusan Dinas Sosial. Untuk pemberian makan bergizi, diupayakan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan.

"Selain itu ditekankan juga pentingnya kesadaran ibu menggunakan ASI eksklusif dan melaksanakan pola asuh yang baik bagi anaknya," ungkap Jaya.

Jaya pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DKP3A) bersama BKKBN, dengan program Sekolah Calon Pengantin, Sekolah Ibu Hamil, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

"Semua dinas terkait dirangkul dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kaltim dalam konvergensi penanganan program," ujarnya.

Kemudian, program intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kaltim, antara lain pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan minimal empat kali bagi ibu hamil, pemberian vitamin A bagi anak-anak, dan pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami kekurangan energi kalori atau MPASI.

"Ketika ibu melahirkan harus memberikan ASI selama 24 bulan kemudian imunisasi dasar lengkap bagi anak," imbuhnya.

Menurut Jaya, beberapa program intervensi spesifik lainnya terkait anak yakni melakukan timbang berat badan dan diukur tinggi badan serta dipantau setiap bulan dan dilaporkan di TPPS.

"Tadi sudah dilibatkan data yang terintegrasi bisa kita lihat sebulan sekali melalui data geospasial, kita bisa melihat bayi lokasinya dimana dan posyandunya apa," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita**Editor : Nicha Ratnasari**



**KELILING KALIMANTAN, DPKD KALTIM
SIAP KERJA SAMA KEMBANGKAN
BUDAYA & PELESTARIAN NASKAH KUNO**



BPKAD DAN DPKD KALTIM MUSNAHKAN ARSIP BERUSIA LEBIH DARI 10 TAHUN



Pemusnahan arsip menggunakan mesin pencacah arsip

SAMARINDA - Arsip yang telah melampaui batas usia ideal yakni 10 tahun harus dimusnahkan. Hal ini berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Atas dasar tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim melakukan pemusnahan Arsip Ex Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim kurun waktu Tahun 2007 sekaligus penyerahan arsip statis kepada DPKD Kaltim, yang dilaksanakan pada Selasa (3/10/2023) bertempat di Aula Kantor BPKAD Jalan Kusuma Bangsa Samarinda Kota.

Pemusnahan arsip tersebut, dihadiri langsung oleh Arsiparis Alih Media Ketua Tim Akuisisi Kementerian Lembaga Perpindahan Ibukota Negara, Drs. Tato Purjianto, Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Ir. Riza Indra Riadi, M.Si., Plh DPKD Kaltim Taufick S.Sos, M.Si Dan Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E, MM.

Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E, MM dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyebutkan bahwa di

lembaganya terdapat 9.425 berkas arsip statis, 85 berkas arsip akan diserahkan dan disimpan DPKD Kaltim, dan data lainnya 2.236 arsip disimpan BPKAD berstatus inaktif dan 6.707 arsip disetujui untuk dimusnahkan.

"6.707 arsip telah disetujui dimusnahkan, saya sangat apresiasi pejuang arsip BPKAD. Sejak 2015, BPKAD sudah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 5 kali. Semoga semangat menjaga dan merawat arsip ini dapat menjadi inspirasi bagi SKPD lainnya dalam upaya tertib pengelolaan arsip," papar Fahmi.

Fahmi melanjutkan, BPKAD menjadi SKPD yang dinilai baik dalam pengelolaan arsip setelah Universitas Indonesia. Namun, bukan hanya dari segi prestasi yang harus ditiru akan tetapi komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan yang menjadi harapan Fahmi kepada seluruh OPD di Kaltim.

"Bukan hanya prestasi, Yang paling penting adalah komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan," pungkasnya.

Sementara itu, Plh Kepala DPK Kaltim, Taufik, S.Sos, M.Si, memberikan apresiasi kepada DPKAD atas dedikasinya dalam menjaga pengelolaan arsip dengan tertib.

Taufik menyebutkan saat ini

baru terisi 25 persen penyimpanan arsip OPD di Depo Arsip DPK Kaltim. Ia berharap 75 persen dari ruang penyimpanan Depo Arsip turut dapat diisi oleh berkas OPD lainnya.

"DPKD Kaltim menjadi pilot project untuk OPD lain dalam menerapkan sistem penataan arsip. Mohon partisipasinya secara professional kepada masing-masing OPD. Arsip yang dikelola dengan baik akan mempunyai nilai yang sangat vital dan penting," jelas Taufik kepada para audiens yang hadir.

Usai sambutan agenda kemudian dilanjutkan dengan proses pemusnahan arsip melalui mesin pencacah arsip oleh Plh Kepala DPK Kaltim, Kepala BPKAD Kaltim, dan perwakilan ANRI. Ditutup dengan penyerahan arsip statis secara simbolis oleh BPKAD kepada DPK Kaltim.

Diketahui, Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PENTINGNYA PENGARSIPAN ARSIP STATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH



Arsiparis Ahli
 Muda DPKD
 Kaltim Dewi
 Susanti MM

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan terus mengupayakan terciptanya tertib arsip di lingkungan Pemprov Kaltim, salah satunya adalah menampung arsip statis.

Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim, Dewi Susanti menjelaskan Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yakni Organisasi Perangkat Daerah. Karena, masih memiliki nilai guna kesejarahan, walaupun telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan UU RI pasal 18 No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, diamanatkan bahwa setiap unit pencipta arsip memiliki tugas melakukan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dalam hal ini adalah DPKD Kaltim.

"Penyerahan arsip tersebut merupakan upaya pengamanan dan pelestarian arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah, bukti keberadaan (evidential), informasional (informational), dan intrinsik (intrinsic) DPKD Kaltim," ungkap Dewi

Pada umumnya, arsip statis sudah berakhir nilai gunanya sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja bagi

unit pencipta arsip namun masih memiliki kegunaan yang lebih luas untuk kepentingan umum sebagai sumber informasi, bahan penelitian dan pembelajaran, atau nilai sejarah.

"Dari arsip kita akan bercerita soal kita dulunya Kaltim dan Kaltara itu satu provinsi, juga sejarah soal otonomi daerah dulu kita belum otonomi sekarang sudah otonomi, atau yang sekarang sejarah soal penetapan IKN, generasi mendatang pasti bertanya catatan sejarah soal penetapan IKN sebagai ibu kota negara Nusantara, yang dulunya ibu kota Indonesia di Jakarta dan sekarang di Kalimantan Timur," jelasnya.

Pentingnya pengarsipan oleh penyelenggaraan pengarsipan adalah untuk merawat dan melestarikan arsip, sebagai alat bukti jika terkendala hukum juga sebagai pacuan tolak ukur pedoman kinerja selanjutnya.

"Misalkan ada yang terkendala hukum maka arsip-arsip ini bisa jadi bukti, terus bisa juga dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang ingin peningkatan target tahun mendatang, otomatis kita melihat kilas kinerja tahun lalu," ujarnya.

Selain itu juga arsip sebagai sumber bahan penelitian, seperti lembaga mahasiswa, pendidikan lembaga sejarah, Sebagai memori kolektif bangsa sumber sejarah baik itu untuk generasi sekarang juga untuk

generasi mendatang.

Lembaga - lembaga yang rajin setiap tahunnya menyerahkan arsip kepada DPKD Kaltim adalah BP-KAD, Bappeda, Dinas Perkebunan, dan Bagian Umum Pemprov Kaltim yang membawahi sembilan biro.

"Jadi ada yang sudah dan ada pula yang masih bertahap mengirim arsip statusnya" katanya.

Dia berharap kepada lembaga perangkat daerah lainnya untuk memanfaatkan tempat arsipnya agar lebih memudahkan pengarsipan.

Bahkan saat ini Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan surat tentang penataan arsip Sekretaris Daerah Kaltim no 005/131726/DPK/V/31 Agustus 2023 mengatakan bahwa penataan pengelolaan arsip di semua perangkat daerah Kaltim, pengelolaan arsip dinamis statis pencipta arsip semua pemerintah di Kalimantan timur, arsip statis yang memiliki nilai guna wajib diserahkan, disimpan dan dilestarikan ke lembaga kearsipan Kalimantan Timur.

"Kita ingin mewujudkan sadar gerakan arsip disemua unit kerja, kiranya nanti setiap lembaga perangkat daerah Kaltim untuk melakukan koordinasi pengelolaan arsipnya ke DPKD Kaltim, kami tunggu," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor :Nicha Ratnasari



Pustakawan
Ahli Muda
Winda
Fitri Yantie.

iKALTIM, PERPUSTAKAAN DIGITAL YANG MEMUDAHKAN MASYARAKAT

SAMARINDA - Siapa yang sudah tahu? Ternyata Dinas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini memiliki perpustakaan digital namanya iKaltim, sebagai sarana untuk mencari buku dalam bentuk digital atau ebook bagi yang tidak sempat ke Perpustakaan Kaltim.

Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim Winda Fitri Yantie mengatakan, aplikasi iKaltim merupakan aplikasi perpustakaan digital yang bisa didownload di Playstore. Di dalam aplikasi tersebut tersedia ribuan ebook yang bisa dibaca di dalamnya.

"Jadi kalau nggak sempat ke Perpustakaan, bisa mencari buku bacaan atau referensi di iKaltim. Syaratnya mudah, kita untuk masuk cukup mendaftar secara online menggunakan email dan FB," kata yang sering disapa Yantie ini.

Setiap ebook yang tersedia di iKaltim tidak bisa di download, hanya bisa dibaca dan berjang-

ka waktu. Ini untuk menjaga hak cipta pemilik buku, agar tidak sembarangan orang bisa mengambil bukunya.

"Kita menjaga hak cipta, jadi nggak bisa sembarangan di download, dan jangka waktunya juga sekitar 1 minggu sudah hilang, Jadi perlu membuka dari awal kembali jika ingin meneruskan membaca " ungkapnya.

Dia menyebutkan banyak yang merasa terbantu dengan hadirnya iKaltim ini, karena sangat memberikan kemudahan para pembaca jika ingin mencari sebuah referensi.

"Bahkan ada dosen berkata dengan saya, dengan adanya iKaltim ini sangat membantu sekali mencari buku bacaan dan nggak harus beli karena bisa dibaca secara gratis. Kurikulum Merdeka itu kan para pengajar diminta mencari referensi sendiri, nah dari iKaltim mereka merasa terbantu nggak harus ke sana ke mari cari referensi," ujarnya.

Yantie pun berharap semua

lapisan masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah secara gratis ini. Dengan harapan agar bisa menambah wawasan dan inspirasi baru dari ebook yang ada di iKaltim.

"Jadi kita setiap tahun terus mensosialisasikan iKaltim, agar bisa dimanfaatkan, Karena nggak perlu datang, walaupun kita berada jauh bisa membaca dari perpustakaan digital ini, karena ribuan Ebook ini banyak berkaitan dengan pertanian, perkebunan, ekonomi, biologi, politik dan buku-buku referensi lainnya," tutupnya.

Diketahui, aplikasi iKaltim atau perpustakaan digital ini telah dicanangkan oleh Gubernur Kaltim sejak 2016 silam. iKaltim diciptakan sebagai sarana online bagi masyarakat yang membutuhkan buku bacaan jika tidak sempat untuk berkunjung ke Perpustakaan. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratmasati



Pustakawan
Ahli Muda
Patimah Irni
SPd MSI

KELILING KALIMANTAN, DPKD KALTIM SIAP KERJA SAMA KEMBANGKAN BUDAYA & PELESTARIAN NASKAH KUNO

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan berkeliling pulau Kalimantan untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Pengembangan Center of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Taman Pintar Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Juli 2023 lalu.

Keliling Kalimantan ini dalam rangka mengunjungi DPKD yang belum menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan DPKD Kaltim. Sejauh ini yang telah bertanda tangan baru DPKD Kaltara, sisanya adalah Kalsel, Kalteng dan Kalbar.

"Waktu kita rakor, semua perwakilan dari 5 provinsi di Kalimantan itu setuju adanya kerja sama kebudayaan. Tapi waktu itu cuma dihadiri oleh kabit-kabitnya saja. Oleh sebab itu kami yang akan berkunjung ke dinas perpustakaan yang ada di Kalsel, Kalteng dan Kalbar," ungkap Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni saat ditemui MediaKaltim.com di ruang kerjanya Senin (2/10/2023) lalu.

Pihak DPKD Kaltim sudah melaku-

kan rapat internal untuk penentuan kapan akan berangkat keliling ke tiga provinsi tersebut.

"Kita target sih bulan Oktober ini jadwal sudah siap, tapi paling tidak November sudah selesai semua PKS ini," tegasnya. Dengan ditanda tangannya PKS tersebut nantinya, kerja sama antar provinsi se-Kalimantan untuk melestarikan Budaya dan naskah kuno bisa dijalankan.

Kerja sama ini penting karena mengacu pada Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 78a tahun 2011 hanya ada enam Badan Perpustakaan Provinsi yang ditetapkan menjadi Center of Excellent, dan Kaltim salah satunya.

Penunjukkan Kaltim sebagai Center of Excellent sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga sekarang belum ada perkembangan kegiatan atas program yang harus dijalankan.

Daerah yang ditunjuk sebagai Center of Excellent sendiri memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya dan etnis di Kalimantan.

Selain itu, Irni mengatakan DPKD

Kaltim telah mengembangkan website Pustaka Borneo yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengenalkan semua kultur budaya yang ada di Kalimantan.

"Jadi kita juga sudah sosialisasikan Web Pustaka Borneo, semua konten budaya yang ada di Kalimantan bisa kita muat disana, nanti semua konten budaya yang diajukan dari seluruh Kalimantan, sebelum di upload pastinya akan berkoordinasi dengan kami di sini terlebih dahulu sebagai pengelola website Pustaka Borneo," ujarnya.

Karena pentingnya sejarah, budaya dan kultur Kalimantan untuk dikembangkan, maka DPKD Kaltim berharap hal ini didukung oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar kebudayaan Kalimantan bisa terjaga.

"Tentunya kami juga membutuhkan dukungan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, terutama kalo bisa Anggota DPRD Kaltim pun harus mendukung, agar lebih mudahnya dalam pengembangan kebudayaan, sejarah dan pelestarian naskah-naskah kuno ini," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PENGERJAAN KALANJUTAN RUMJAB BUPATI PPU DIKEBUT, 2024 DIFUNGSIKAN



**BLK KOMUNITAS GELAR PELATIHAN
UMKM UNGGUL**



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka seleksi tertulis cakades, Senin (9/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

SELEKSI TERTULIS 22 CAKADES, PEMKAB PPU LIBATKAN ICLD UI

PPU - Sebanyak 22 orang bakal calon kepala desa (cakades) mengikuti seleksi tertulis, Senin (9/10/2023). Para Cakades tersebut berasal dari tiga desa yang menggelar Pemilu Kepala Desa (Pilkades) 2023.

Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU itu yakni diikuti Desa Giripurwa Kecamatan Penajam sebanyak 9 orang, Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu 7 orang dan desa Labangka Barat Kecamatan Babulu sebanyak 6 orang.

"Sesuai ketentuan, jika di satu desa memiliki bakal calon kepala desa lebih dari 5 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berkas pada saat proses pendaftaran, maka dilakukan seleksi tambahan," jelas PJ Bupati PPU Makmur Marbun.

Ia juga menekankan pentingnya proses seleksi yang fair-play (sportif). Dalam hal itu, Pemkab PPU menghadirkan langsung tim independen dari Indonesian Center For Legislative Drafting (ICLD) Universitas Indonesia (UI).

Hal ini tentu didasari pada beberapa pertimbangan. Di antaranya, lanjut Makmur, untuk memberikan jaminan dan keyakinan kepada peserta ujian bahwa seleksi ini benar-benar objektif.

Kemudian tanpa ada unsur kepentingan. Tidak ada campur tangan ataupun intervensi dari pihak manapun.

"Saya tidak mau melakukan seleksi kalau dalam prosesnya ada yang main mata. Oleh karena itu, hari ini saya harus panggil tim yang independen untuk melakukan seleksi ini," tegasnya.

Sekadar informasi, pada 2023 ini akan diselenggarakan Pilkades serentak di PPU. Diikuti oleh 14 desa yang tersebar di 4 kecamatan.

Sesuai matriks tahapan yang telah berjalan, pelaksanaan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2023 mendatang.

Lebih lanjut, Makmur mengapresiasi antusiasme peserta cakades di PPU. Pasalnya di beberapa desa pesertanya melebihi jumlah yang ditentukan.

"Saya berharap keinginan menjadi kepala desa itu bukan hanya karena tertarik dengan besarnya anggaran yang ada di desa. Tetapi lebih dari itu mampu membawa kemajuan bagi daerahnya khususnya desa yang dipimpin nantinya," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



Para peserta pelatihan yang akan digelar 20 hari ke depan. (Robbi/MediaKaltimGrup)

BLK KOMUNITAS GELAR PELATIHAN UMKM UNGGUL

PPU - Balai Latihan Kerja Komunitas Aulia Hutama Humairoh, menggelar pelatihan untuk berwirausaha, Senin (9/10/2023). Kegiatan ini digelar dalam upaya mendorong kapasitas masyarakat berbasis kompetensi.

Berkedudukan di Kelurahan Waru, pelatihan ini bermitra dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ketua Panitia, Yuli Antoni mengatakan pelatihan kali ini diikuti 16 peserta.

Mereka dinilai memiliki semangat untuk mendapatkan peluang yang lebih luas. "BLK Komunitas ini mendorong upaya nilai dan manfaat sejauh mana peserta ini bisa memberikan perluasan kesempatan kerja," tuturnya.

Yuli menyebutkan, kegiatan ini sebagai wadah dalam menciptakan pengusaha baru bagi pelaku UMKM lokal. Pun pihaknya melihat potensi hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan proyeksi migrasi penduduk besar.

Gelaran ini juga sejalan dengan langkah Pemkab PPU untuk mempersiapkan masyarakatnya dalam hadirnya IKN. Yakni salah satunya dengan meningkatkan kompetensi

siap bekerja dan berperan.

"Kami mendorong selama 30 hari ke depan, sejauh mana upaya untuk memaksimalkan pelatihan itu bisa terserap secara langsung dan bisa diimplementasikan ketika selesai dari pelatihan," jelas Yuli.

Lebih lanjut, hadirnya BLK Komunitas juga dianggap sebagai wadah diskusi. Jadi tak hanya sebagai tempat pelatihan namun dapat memberikan sebuah solusi dan tantangan.

"Upaya kerja sama melalui jejaring kemitraan, untuk Kita bisa suplai kebutuhan di pemerintah atau di masyarakat," tutur Yuli.

Selain dari itu, adanya BLK komunitas tengah mempersiapkan pilot project hasil pelatihan ini. Produk unggulan terkait dengan hasil pelatihan menjadi harapan utama pihaknya terhadap para peserta.

"Tidak hanya mampu sebagai karyawan, tetapi juga bagaimana kami menciptakan pengusaha baru di bidang UMKM," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



Pintu Gerbang Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

DISDIKPORA PENAJAM SIAPKAN LANGKAH UPAYA HILANGKAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

PENAJAM - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan sejumlah langkah sebagai upaya menghilangkan perundungan (bullying) di sekolah di daerah berjuluk Benuo Taka itu.

"Perundungan di sekolah pasti ada walaupun kecil," ujar Kepala Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin di Penajam, Minggu.

Perundungan yang terjadi di sekolah, lanjut dia, mulai dari aktivitas yang kecil seperti mengganggu teman lainnya dengan suara maupun dengan gerakan.

Langkah yang disiapkan Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai upaya menghilangkan perundungan di sekolah, tambah dia, memberikan edukasi atau pemahaman kepada peserta didik menyangkut perundungan dan dampak bullying.

Pihak sekolah diminta mensterilkan atau membersihkan ruang publik di lingkungan sekolah yang berpotensi menjadi tempat perundungan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara bakal memberikan instruksi kepada pihak se-

kolah, agar melakukan fungsi kontrol yang maksimal kepada peserta didik di lingkungan sekolah.

"Kami akan membuat surat edaran untuk setiap sekolah agar melakukan langkah upaya menekan, bahkan menghilangkan perundungan di sekolah," jelasnya.

Surat edaran mengenai langkah-langkah menghilangkan perundungan di sekolah itu masih disusun, dan Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara juga bakal membentuk satuan tugas (satgas) anti perundungan di sekolah.

"Satgas yang dibentuk untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah," katanya.

Satgas bukan saja melakukan tindakan terhadap kasus perundungan yang terjadi di sekolah, tetapi memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada peserta didik, guru hingga tenaga pendidik lainnya.

Satuan tugas anti perundungan itu akan melibatkan sejumlah pihak terkait antara lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dan kepolisian, demikian Alimuddin. (Ant/MK)

Oleh Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Budhi Santoso



Kepala Dinas Kukmperindag Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Saidin (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)

PEMKAB PPU MINTA KEMENDAG BANTU PEMBENAHAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT

PENAJAM - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur meminta Kementerian Perdagangan membantu pembenahan dan penataan pasar rakyat untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembenahan dan penataan pasar rakyat, jelas Kepala Dinas Kukmperindag Kabupaten Penajam Paser Utara Saidin di Penajam, Minggu (8/10/2023), didasarkan atas kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Usulan pembenahan dan penataan dua pasar rakyat, lanjut dia, yakni di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam dan di Desa Rawa Mulya Kecamatan Babulu, telah disampaikan kepada Kemendag.

Kedua pasar tersebut diusulkan kepada Kemendag agar mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembenahan dan penataan dengan pertimbangan kondisi pasar kurang layak.

Kemudian telah memenuhi persyaratan menyangkut ketersediaan lahan untuk lokasi pasar dan sejumlah dokumen lainnya telah lengkap.

Pembenahan dan penataan pasar rakyat di Kelurahan Sotek dan Desa Rawa Mulya dilakukan karena kedua wilayah itu bakal menjadi ibu kota kecamatan, menurut dia, setelah

dilakukan pemekaran wilayah di daerah itu.

Pemekaran wilayah dilakukan karena sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Kecamatan Sepaku masuk kawasan Ibu Kota Negara Nusantara.

Keberadaan ibu kota negara Indonesia di sebagai wilayah daerah berjuduk Benuo Taka itu, kata dia, diharapkan pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembenahan dan penataan pasar rakyat di Kelurahan Sotek dan Desa Rawa Mulya.

Dinas Kukmperindag juga tengah mempersiapkan persyaratan sejumlah pasar rakyat lainnya untuk diusulkan dilakukan pembenahan dan penataan, di antaranya di Desa Babulu Laut dan Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu, serta Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku.

Dinas Kukmperindag Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melakukan pembenahan dan penataan pasar rakyat dengan membangun secara permanen.

Pembenahan dan penataan pasar rakyat untuk mewujudkan pasar yang aman, tertib dan nyaman agar masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional, karena keberadaan pasar rakyat mampu mendukung kegiatan ekonomi warga perdesaan dan kelurahan, demikian Saidin. (Ant/MK)

Oleh Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Agus Salim



LANGGAR PERDA TRANTIBUM, 39 PKL TERJARING RAZIA IKUTI SIDANG TIPIRING



**Fasilitasi UMKM, Festival Pekan Raya
Sebulu 2023 Digelar Selama Sepekan**



Pelanggar yang menyetor denda, pasca disidang oleh PN Tenggara. (Rafi'i/Media Kaltim)

LANGGAR PERDA TRANTIBUM, 39 PKL TERJARING RAZIA IKUTI SIDANG TIPIRING

TENGGARONG - Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Kartanegara (Satpol PP Kukar), bersama Pengadilan Negeri (PN) Tenggara dan Polres Kukar, menggelar sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada 17 orang di Pengadilan Negeri (PN) Tenggara, pada Senin (9/10/2023) pagi.

Ini menjadi sidang tahap pertama, lantaran pada Rabu (27/9/2023) lalu, Satpol PP Kukar menjaring sebanyak 39 Pedagang Kaki Lima (PKL). Di mana mereka terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 terkait Ketentraman dan Keteraturan Umum (Trantibum), Pasal 20 dan Pasal 21. Puluhan pedagang ini berjualan di atas fasilitas umum (fasum), seperti di atas drainase, trotoar.

Sebanyak 3 lokasi razia yang digelar oleh Satpol PP Kukar. Yakni di Jalan Danau Semayang dan Jalan Maduningrat, Kelurahan Melayu. Serta di sepanjang

Kelurahan Timbau.

"Hari ini di sidang 17 orang, sisanya pada hari Jumat (13/10/2023) dijadwalkan sisanya, atau Senin (16/10/2023) menunggu jadwal dari PN Tenggara," ungkap Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kukar, Awang M Indrawarman, Senin (9/10/2023).

Sanksi yang dijatuhkan pun, dikatakan Indra, hanya sebatas sanksi denda. Yakni berkisar dari angka Rp 300-800 ribu. Tergantung besar dan kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL yang terjaring. Namun sebelumnya, Satpol PP Kukar melakukan penyitaan barang bukti, berupa tabung gas dan Kartu Identitas Penduduk (KTP) pelanggar.

"Saya rasa ini bisa memberikan efek jera bagi pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Camat Sebulu, Edy Fahrudin. (Istimewa)

Fasilitas UMKM, Festival Pekan Raya Sebulu 2023 Digelar Selama Sepekan

TENGGARONG - Berbagai festival terus digelar di Kutai Kartanegara (Kukar), tepatnya di Kecamatan Sebulu. Festival Pekan Raya Sebulu 2023 ini akan digelar selama 5 hari, yakni sejak tanggal 11 Oktober hingga 15 Oktober 2023.

Diketahui di bulan yang sama, juga akan digelar Festival Pesisir di Kecamatan Muara Badak, di Pantai Panrita Lopi. Berkolaborasi bersama Tirtonegoro Art Festival.

Camat Sebulu, Edy Fahrudin, mengatakan Festival Pekan Raya Sebulu 2023 ini menjadi hajatan m Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar. Tujuannya untuk meningkatkan dan membangkitkan gairah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi dalam rangka untuk

peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sebulu," ungkap Edy.

Nantinya, akan lebih banyak Senin dan budaya lokal Sebulu dalam pergelarannya. Dimana menjadi panggungnya para anak-anak muda lokal asli Sebulu. Seperti didalamnya akan digelar penampilan seni tari tradisional dan fashion show.

Di samping juga akan menghadirkan hiburan masyarakat. Seperti Zumba Party, lomba mewarnai, live musik hingga hiburan dangdut.

"Acaranya nanti dilaksanakan di lapangan Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu," pungkasnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Camat Marangkayu, Ambo Dalle. (Istimewa)

Gandeng Dunia Usaha, Kecamatan Marangkayu Sukses Tangani Stunting

TENGGARONG - Penanganan stunting di Kutai Kartanegara (Kukar), memang menjadi catatan penting. Berbagai upaya dilakukan, agar target stunting menyentuh angka 14 persen, setidaknya pada 2024 mendatang. Hal positif pun diklaim menunjukkan penanganan stunting perlahan membuahkan hasil. Salah satunya di Kecamatan Marangkayu.

Ambo Dalle, camat Marangkayu, pun mengklaim kasus stunting di wilayahnya menurun. Diakuinya dengan mendapat dukungan dari segala pihak, salah satunya dari dunia usaha dan sektor swasta. Yakni perusahaan minyak dan gas (migas) yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu. Sebut saja, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

"Jadi masalah stunting ini, Alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan," jelas Ambo Dalle saat dikonfirmasi.

Dukungan yang dimaksud pun, seper-

ti upaya pemenuhan gizi masyarakat Kecamatan Marangkayu, terutama di ring 1 wilayah operasi mereka setiap bulannya. PHKT misalnya, yang menyalurkan makanan berupa telur dan gizi lainnya ke warga secara langsung. Dengan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu juga, mengantar langsung ke sekolah-sekolah. Hingga saat ini, terus rutin dilaksanakan oleh perusahaan migas tersebut. "Penanganan stunting ini sesuai arahan Bupati Kukar yang ingin Kukar angka stuntingnya turun," lanjutnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem pun turut menjadi perhatian. Yakni melalui proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Desa (Kades) Bloro, Muhamad Muhtar. (Istimewa)

Cegah Pergaulan Bebas, Pemdes Bloro Siapkan Pembinaan Keagamaan dan Olahraga

TENGGARONG - Pemerintah Desa (Pemdes) Bloro, Kecamatan Sebulu, menunjukkan kepeduliannya kepada generasi mudanya. Memastikan anak-anak hingga pemuda dan pemudinya tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Salah satunya dengan menyiapkan pembinaan dalam hal keagamaan dan olahraga.

Dijelaskan oleh Kepala Desa (Kades) Bloro, Muhamad Muhtar, untuk pembinaan keagamaan akan mendatangkan guru agama atau ustaz. Yang nantinya akan mengajar anak-anak maupun pemuda Desa Bloro untuk belajar kaligrafi, mengaji, bahkan untuk mencetak Hafiz Quran.

Bahkan saat ini, perangkat desa tengah melakukan pendataan warga yang nantinya akan ikut belajar mengaji. "Desa yang nantinya mengadakan untuk masyarakat, (pembelajaran) difokuskan di kantor desa," ujar Muhtar.

Sementara untuk bidang keolahragaan, beberapa pembinaan akan dilakukan oleh

Pemdes Bloro. Seperti pembinaan pelatih sepakbola, pembinaan Sekolah Sepak Bola (SSB), olahraga bola voli. Serta olahraga yang kini sedang diminati, yakni mini soccer.

Tujuannya, ia ingin mencetak pemuda-pemudi yang nantinya bisa mewakili Kutai Kartanegara (Kukar) diajang Musab-aqoh Tilawatil Quran (MTQ). Sementara di olahraga, bisa mencetak atlet-atlet handal asli putra daerah untuk membela panji Kukar.

"Untuk anak-anak kita biar kurang main HP, kalau ada kegiatan pembinaan SSB usia dini, supaya anak-anak ini melakukan hal positif," lanjutnya.

"Kalau dengan agama dan olahraga bisa mengontrol diri dan tidak terjerumus di hal-hal yang negatif, karena jamannya HP ini luar biasa. Itu harapan kita penguatannya, akan lebih fokus lagi pada tahun depan (2024)," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



DEWAN KEMBALI USULKAN TAMBAHAN INSENTIF GURU HONORER SEKOLAH SWASTA

BACA HALAMAN A2

**Pemerintah Diminta Perhatikan
Pemeliharaan dan Kebersihan
Masjid Terapung**





Ilustrasi guru honorer sekolah swasta. (ist)

Dewan Kembali Usulkan Tambahan Insentif Guru Honorer Sekolah Swasta

BONTANG - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengungkapkan, bahwa DPRD Bontang kembali mengusulkan agar insentif para guru honorer di sekolah swasta jenjang PAUD hingga SMP dinaikkan.

Menurutnya, guru swasta ini memiliki peran penting dalam mendidik karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sama seperti halnya para guru-guru di sekolah negeri.

"Para guru swasta memiliki hak yang sama untuk mendapat kenaikan insentif. Karena mereka sama-sama berjuang mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.

Jumlah APBD-Perubahan 2023 yang mencapai Rp 2,5 triliun dinilai AH sa-
paan akrabnya, cukup untuk mencover

tambahan insentif kepada dua ribu guru honorer di kota taman.

"Saat ini guru tingkat SMA dan SMK ranahnya sudah di Pemprov Kaltim. Saya rasa kalau anggaran segitu, bisalah mencover permintaan tambahan insentif para guru swasta," timpalnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang Baidlowi mengatakan, sudah 10 tahun terakhir tidak ada kenaikan insentif bagi para guru swasta. Ia pun meminta agar besaran kenaikan insentif minimal bisa 50 persen. Apalagi harga bahan pangan pokok di pasaran terus meningkat.

"Ini sudah angka yang tepat, tiap guru maksimal mendapat kenaikan Rp 1,5 juta tiap bulan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erynowati menjelaskan, bahwa memang belum mencantumkan untuk penambahan insentif guru honorer. Sebab, regulasi terkait itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018. Sementara, terkait kondisi keuangan daerah dijelaskan Aji tidak ada masalah.

Namun, Pemkot tidak mau menabrak regulasi. Ia pun belum bisa mematok target terkait apakah penambahan ini akan diajukan tahun depan.

"Memang usulan untuk penambahan insentif guru honorer ini muncul di detik-detik sebelum pembahasan APBD perubahan. Kami belum bisa tambah karena ketentuannya pakai Perda. Jadi harus revisi perda dulu," terangnya. (al/adv)



Masjid Terapung Darul Irsyad Selambai. (ist)

Pemerintah Diminta Perhatikan Pemeliharaan dan Kebersihan Masjid Terapung

BONTANG – Masjid Terapung Darul Irsyad Selambai, Loktuan, kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Hal itu terbukti dengan minimnya perawatan pada masjid yang telah diresmikan dan difungsikan pada awal Maret 2022 lalu.

Hal itu disayangkan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Faisal.

Diungkapkan anggota dewan yang berdomisili di Selambai tersebut, Masjid Terapung saat ini menjadi ikon wisata religi kota taman yang banyak dikunjungi masyarakat, namun sangat disayangkan kurang mendapat perhatian terkait pemeliharaan

fasilitas masjid.

"Padahal sudah setahun diresmikan, tapi kurang diperhatikan pemeliharaan fasilitasnya," ujarnya.

Dirinya meminta agar kebersihan masjid lebih dijaga dan dikelola dengan baik. Selain petugas kebersihan, juga bisa melibatkan dan mengajak para jemaah masjid.

"Petugas kebersihan kerjanya cuma Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu tidak ada yang bersihkan, apalagi kalau ada kapal datang, banyak penumpang kapal pakai toilet itu," ungkap Politikus Partai Nasdem ini. (al/adv)



Pasar Taman Rawa Indah. (ist)

Andi Faiz Apresiasi Rampungnya Pembangunan Lift di Pasar Tamrin

BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengapresiasi rampungnya fasilitas Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin), yaitu pembangunan lift. Hadirnya lift bakal mempermudah mobilisasi angkutan barang dagangan dan para pembeli.

Menurutnya, alasan sepinya pengunjung di Pasar Tamrin dikarenakan akses yang sulit, sehingga para pedagang memilih mengosongkan lapaknya di pasar berantai 4 tersebut dan memilih untuk berjualan di luar.

“Sejak awal salah satu yang jadi keluhan pedagang adalah akses yang sulit di pasar, sehingga banyak yang milih jualan di luar. Pemerintah memang sudah seharusnya berbenah,” ujarnya.

Maka itu, dirinya berharap dengan adanya pembenahan fasilitas yang ada di pasar

bisa meningkatkan geliat ekonomi di pasar semakin baik lagi. Para pedagang pun bisa kembali lagi berjualan di dalam pasar.

“Para pedagang di luar pasar diharapkan dapat pindah dan kembali mengisi kios-kios yang telah disediakan. Area luar pasar bisa disterilkan menjadi lebih rapi dan bersih,” terangnya.

Maka itu, Politikus Partai Golkar ini meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait, agar segera berkoordinasi terkait rencana relokasi kepada para pedagang di luar, agar bisa segera pindah ke dalam pasar. Arus lalu lintas pun menjadi aman dan tidak terganggu lagi.

“Tinggal dorongan dari semua pihak agar penataan pasar lebih baik lagi. Mungkin bisa dibuatkan surat perintah kapan mereka harus pindah, jadi tidak mendadak, usahakan upaya persuasif,” tandasnya. (al/adv)



Ruang VVIP Wijaya Kusuma di RSUD Taman Husada Kota Bontang. (Yahya Yabo)

Tambah Fasilitas, 6 Ruang VVIP Wijaya Kusuma RSUD Mulai Berbenah

BONTANG – RSUD Taman Husada Kota Bontang telah berbenah dengan memiliki Ruang VVIP Wijaya Kusuma. RSUD telah melakukan perbaikan dengan menyediakan 6 ruangan VVIP di Ruang Wijaya Kusuma.

Humas RSUD Taman Husada Kota Bontang, dr Siti Aisyatur Ridha menjelaskan, Ruang Seruni memiliki ruang kelas I dan VIP serta ruang Wijaya Kusuma diperuntukkan kelas VVIP.

“Di Seruni ada unit Wijaya Kusuma untuk VVIP. RSUD saat ini telah berbenah dengan memiliki ruangan Wijaya Kusuma 1-6 yang diperuntukkan bagi layanan jaminan kesehatan umum atau perusahaan. Kalau plafon kesehatannya memenuhi maka kami akan fasilitasi,” kata dr Ridha.

Dr Ridha menambahkan saat ini tampilan Wijaya

Kusuma telah dipercantik dan diperbaiki dengan tetap melengkapi beberapa fasilitas ruangan.

“Peminatnya juga banyak, dengan fasilitas VVIP,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa masih ada beberapa ruangan yang diperbaiki dan diubah untuk kenyamanan pasien. “Ada dua ruangan masih perbaikan. Saat ini 6 ruangan telah digunakan dan dibuat nyaman. VVIP juga melayani ketika ada pasien yang ingin naik kelas dan pasien umum,” ungkapnya.

Sementara, ruang Seruni RSUD memiliki beberapa ruang seperti kelas 1 dan ruang VVIP.

“Kami tetap fasilitasi penunggu pasien juga ketika menjaga pasien di rumah sakit, harapan kami pasien menjadi nyaman dengan adanya pembenahan ruangan-ruangan ini,” tandasnya. (yah/adv)



Kanreg VIII BKN Apresiasi Pemkot Bontang Atas Komitmen Peningkatan Kualitas Data ASN Terintegrasi SIASN

BONTANG - Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (Kanreg 8 BKN) memberikan piagam penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada Pemkot Bontang atas Komitmen Peningkatan Kualitas Data ASN Terintegrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Pemberian penghargaan tersebut ditandatangani Kepala Kanreg 8 BKN A. Darmuji, S.Sos, M.Si yang diserahkan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Bagus Adi Noegroho, ST kepada yang mewakili Walikota Bontang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Syahrudin, SE, M.A.M.Eng didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang Drs. Sudi Priyanto, M.Si pada Senin 9 Oktober 2023.

SIASN merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintahan Daerah.

Ini menjadi bagian dari reformasi yang harus memberikan dampak bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, BKN mengimplementasikan digitalisasi manajemen ASN dalam SIASN.

Menurut Sudi Priyanto, bahwa sebelumnya pihaknya telah memiliki Simpeg

(Sistem Informasi Kepegawaian) yang merupakan aplikasi kepegawaian untuk melingkupi seluruh data kepegawaian ASN Kota Bontang, karena selama ini telah berjalan efektif maka bersama BKN telah dilakukan integrasi dua arah antara Simpeg dengan SIASN.

"Ini merupakan rangkaian informasi dan data Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi," katanya.

Lebih lanjut upaya yang dilakukan adalah mencoba meningkatkan kualitas data dengan melakukan updating data secara berkelanjutan bersama Tim BKPSDM dengan admin perangkat daerah/ UPT/ kelurahan se Kota Bontang.

"Inilah yang kemudian diapresiasi oleh Kanreg BKN sebagai wujud komitmen instansi pemerintah daerah dalam menyipakan data kepegawaian yang berkualitas. Dengan harapan akan memberikan kemudahan bagi kami bersama BKN dalam melakukan proses layanan kepegawaian secara menyeluruh kepada ASN Kota Bontang," bebernya.

Sementara Darmuji, mengatakan upaya yang dilaksanakan Pemkot Bontang merupakan langkah yang baik dalam menyelesaikan disparitas data ASN. "Hal lain yang juga menjadi apresiasi kami

adalah dukungan kegiatan pembekalan/ pelatihan yang diberikan kepada admin perangkat daerah sehingga mengetahui dan mampu membantu peremajaan data secara lengkap dan bertanggung jawab," bebernya.

Peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN adalah suatu proses yang harus berlangsung secara terus menerus, dengan tujuan:

1. Pelaksanaan LAYANAN PUBLIK MANAJEMEN ASN, yaitu:

- Perencanaan pengadaan ASN
- Perekrutan dan orientasi untuk mendapatkan talenta terbaik
- Pengembangan kapasitas, melalui pengurangan kesenjangan kompetensi
- Penilaian Kinerja dan pemberian penghargaan untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan
- Promosi, Rotasi dan Pengembangan karir menuju ASN yang dinamis
- Purnabakti melalui pemberian apresiasi yang layak

2. Mewujudkan SATU DATA ASN YANG BERKUALITAS guna mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data. (ADV)



Foto: Penandatanganan bonus atlit. (Syakurah/Radarbontang)

Nominal Tak Sesuai Komitmen, Pelatih dan Manajer Atlit Tolak Tandatangan Bonus

BONTANG – Para pelatih, manajer, serta official Cabang Olahraga (cabor) enggan menandatangani administrasi pencairan bonus Porprov VII 2022. Hal itu dikarenakan besaran yang diberikan, dinilai tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Kondisi itu terjadi saat penyerahan penghargaan serta bonus dari Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII 2022 lalu. Pengambilan bonus tersebut dilakukan di Aula Dispopar, Senin (9/10/23)

Pelatih Cabor Judo, Sulis Subiarti mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Karena sebelumnya pemerintah menjanjikan bonus yang diterima setidaknya akan bernominal sama seperti porprov sebelumnya.

“Pemerintah sempat menyampaikan saat penyerahan bonus secara simbolis, bahwa setidaknya nominal yang kami terima akan sama dengan tahun lalu. Tapi pas datang ke sini kita lihat beda, kami akan

ajukan ke wali kota beserta DPRD nanti,” jelasnya.

Pada Poprov sebelumnya, besaran penghargaan dan bonus didapat dengan mengalikan jumlah medali yang diraih, namun kini hanya dihitung dengan medali tertinggi yang didapat.

Adapun penghargaan yang didapat Cabor Judo Bontang yakni, empat medali emas, dua medali perak, dan 18 medali perunggu.

Hal yang sama diungkapkan Pelatih Panjat tebing, Yusraini. Ia juga merasa kecewa dengan keputusan tersebut, karena persiapan Poprov kemarin cukup memakan waktu yang lama dan uang akomodasi yang banyak ditombok.

“Uang akomodasi ditanggung pemerintah hanya 40 persen, yang berarti hanya 8 dari 16 personil yang tercover,” jelasnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



Situasi penandatanganan bonus porprov di Aula Dispapar. (Syakurah/Radarbontang)

Diprotes Atlit Bonus Lebih Banyak Manajer, Dispapar Ubah Sistem Pembagian

BONTANG - Ketidaksesuaian bonus bagi cabang olahraga (cabor) yang meraih medali dalam Porprov VII di Kabupaten Berau pada tahun 2022 lalu, membuat para pelatih, manager serta official menolak untuk menandatangani pencairan bonus.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispapar) Bontang, Ahmad Aznem menilai, jika satu cabor hanya dihitung satu pelatih, sehingga perhitungan mereka dirasa sudah pas.

"Saya tidak tahu kalau satu cabor pelatih bisa sampai tiga, dan manager sama official juga ada bonus sendiri," jelasnya Senin (9/10/23).

Ia menjelaskan, bahwa walaupun pelatih, manager, dan official menolak untuk tanda tangan, hal tersebut tidak mempengaruhi pencairan bonus yang nantinya akan dikirim ke BPKAD.

"Kami akan infokan ke BPKAD, walaupun ada yang tidak ditandatangani tidak apa, karena mereka sudah memberikan nomor rekening jadi ya tetap kami transfer. Kalau tidak diterima kami akan tetap kembalikan ke kas daerah," jelasnya.

Adapun sistem perhitungan bonus pada tahun 2018 untuk manager hingga official, dikalkulasikan berdasarkan total perolehan medali memang diterapkan saat Porprov Kaltim di Kutim. Namun, kini Dispapar mengganti sistem tersebut, tidak diterapkan lantaran mendapatkan protes dari para atlit.

"Kemarin atlit komplain, kenapa lebih banyak bonus untuk manager daripada atlit. Karena kalkulasin-

ya, misalkan satu atlit dapat emas satu dan dalam cabornya memperoleh 10 emas, kalau dikalkulasi lebih banyak untuk manager," jelasnya.

Kepala Bidang Olahraga, Muhtar menambahkan, untuk bonus atlit pada anggaran murni 2023 senilai Rp 5 miliar. Jumlah tersebut termasuk untuk kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) sehingga tersisa Rp 4 miliar.

"Pada APBD perubahan 2023 Dispapar hanya mendapatkan tambahan 6 miliar untuk bonus atlit. Jadi total Rp 10.5 miliar," ungkapnya.

Adapun jumlah yang diberikan seperti berikut. Untuk yang mendapatkan medali emas perorangan Rp 50 juta, Perak Rp 25 juta dan Perunggu Rp 15 juta. Untuk grup 2 sampai 5 orang medali emas mendapat Rp 75,3 juta, perak Rp 50 juta, perunggu Rp 22,5 juta

Kemudian untuk grup 6 sampai 10 orang, medali emas mendapatkan Rp. 112.5 juta, perunggu Rp 56.2 juta, perak Rp 33.7 juta dan jika lebih dari 10 orang untuk emas Rp 168.7 juta, perak Rp 84.3 juta, dan perunggu Rp 50.6 juta.

Sementara itu untuk manager yang emas mendapat Rp 25 juta, perak Rp 15 juta, perunggu Rp 10 juta. Kemudian untuk pelatih emas Rp 30 juta, perak Rp 17 juta, perunggu Rp 12 juta. Terakhir untuk official medali emas mendapat Rp 10 juta, perak Rp 7.5 juta, dan perunggu Rp 5 juta.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



Terlihat informasi layanan E-resep pada layar apotek rawat jalan RSUD. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

Pasien Tak Perlu Lagi Antre Obat, RSUD Taman Husada Terapkan Layanan E-Resep

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang menerapkan E-Resep pada pelayanan farmasi Apotek Rawat Jalan.

Kepala unit depo farmasi rawat jalan RSUD Bontang, Altarina Asis, menjelaskan mekanisme pelayanan apotek rawat jalan di RSUD yakni dengan menggunakan resep dari dokter sesuai dengan pelayanan kesehatan namun dokter meresepkan dengan E-Resep.

"Untuk pelayanan resep harus mendapatkan resep dari dokter. Untuk pelayanan resep di farmasi apotek rawat jalan RSUD sudah menggunakan E-Resep (e-prescribing). Kemudian layanan kami sudah elektronik, tinggal melihat nama di layar," kata Altarina Asis kepada MediaKaltim.com saat ditemui, Senin (9/10/2023).

Selanjutnya, Ia mengatakan kemudahan ini diberikan agar menghindari antrean bagi pasien agar tidak mengantre lama. "Dokter yang memeriksa di poli. Kemudian dokter menuliskan resep yang dikirimkan langsung ke apotek. Kemudian pasien tinggal melihat nama di

layar. Akan ada informasi 'menunggu', 'validasi farmasi' 'sedang diproses' kemudian 'selesai'. Itu proses E-Resep di farmasi," jelas Altarina.

Ia menambahkan setiap harinya, farmasi apotek rawat jalan RSUD bisa melayani resep sebanyak 300-350 resep sesuai dengan hari kerja.

"Apotek tetap melayani setiap hari sesuai dengan jadwal jam kerja," katanya.

Selain menggunakan E-Resep di farmasi apotek RSUD Bontang akan memudahkan pasien dengan tidak mengantre untuk menyerahkan resep dari pasien.

"Itu, pasien tidak harus mengantre menyerahkan resep. Sekarang notifikasi sudah akan dikirim ke nomor ponsel pasien baik melalui pesan singkat. Jadi pasien tidak harus menunggu antre. Status resep bisa diketahui," ungkapnya.

Untuk penyelesaian resep obat sendiri dilakukan apotek dengan waktu lebih kurang 30 menit untuk obat non racikan dan untuk obat racikan selama 60 menit. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Ratusan Ormas terlihat mengikuti sosialisasi UU Ormas. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

Ciptakan Kondusivitas Jelang Pemilu, Ratusan Ormas Ikuti Sosialisasi UU Organisasi Kemasyarakatan

BONTANG – Ratusan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Bontang mengikuti sosialisasi yang mengusung tema Peran Ormas Kota Bontang dalam Menjaga Kondusivitas dan Mewujudkan Pemilu Damai di Kota Bontang pada Senin (9/10/2023) bertempat di Auditorium 3 Dimensi.

Sosialisasi kali ini dikhususkan membahas mengenai UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan digelar kegiatan ini tentunya untuk menertibkan dan mendata Ormas yang ada di Kota Bontang dan menjaga kondusivitas Kota Bontang.

Kepala Kesbangpol Bontang, Sigit Alfian mengatakan dengan melakukan sosialisasi UU 17/2013 tentang Ormas untuk kembali memvalidasi data-data Ormas yang ada di Kota Bontang menjelang Pemilu 2024.

"Pertama kita akan mengadakan Pemilu serentak ke depannya. Kemudian melakukan validasi data kepada ormas-ormas di kota Bontang. Sehingga meminta kerja sama Ormas untuk menjaga Kota Bontang dengan berpedoman empat pilar kebang-

saan. Ormas sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah," kata Sigit Alfian kepada Mediakaltim.com, Senin (9/10/2023).

Hal lainnya, Sigit menjelaskan data ormas di kota Bontang yang masih tercatat ada sebanyak 109 ormas. Namun ini masih bertambah dengan adanya ormas yang masih belum melaporkan ke Kesbangpol dengan tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Peran ormas sangat pengaruh dalam Pemilu damai. Kita banyak turun ke ormas-ormas. Tujuannya adalah menuju Pemilu damai 2024," jelasnya.

Sigit juga menyinggung UU 17 tahun 2013 ini merupakan acuan bagi ormas untuk mendirikan, membentuk dan menjalankan ormas hingga fungsi organisasi masyarakat.

"Pesan kami mari kita sama-sama menjaga kondusivitas Kota Bontang dengan menjalankan tugas fungsi ormas dan berkolaborasi dengan tugas masing-masing bersama pemerintah," terangnya.

Pewarta: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari



SYARIFATUL NILAI INTERNET HARUS DIRASAKAN SELURUH MASYARAKAT



**MADRI: PENGURUSAN PBG JANGAN
MEMBERATKAN MASYARAKAT**



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

SYARIFATUL NILAI INTERNET HARUS DIRASAKAN SELURUH MASYARAKAT

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya masyarakat di beberapa kampung yang mengeluhkan tidak adanya jaringan internet disorot Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Ia menuturkan, internet merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan juga dibutuhkan oleh aparaturnya kampung untuk memaksimalkan pelayanan.

“Apalagi di era digital seperti saat ini, wajar saja jika masyarakat membutuhkan internet,” katanya.

Mengenai kebutuhan itu, Syarifatul menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau seharusnya mencari solusi melalui program 1.000 titik WiFi gratis.

“Jadi program tersebut dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Dirinya menilai, pemasangan WiFi gratis harus dilakukan survei terlebih dahulu mengenai lokasi mana yang pantas mendapatkan internet.

“Karena selain masyarakat butuh, kantor-kantor pemerintahan yang ada di kampung juga membutuhkan untuk mengirim data dan laporan,” imbuhnya.

Politikus Golkar ini berharap pemerintah bisa lebih fokus dalam mengentas blank spot.

“Harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

MADRI: PENGURUSAN PBG JANGAN MEMBERATKAN MASYARAKAT

TANJUNG REDEB – Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dianggap memberatkan masyarakat. Hal itu disorot Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dirinya menilai, jika perubahan tersebut memberatkan, lebih baik direvisi. Sebab dengan keluarnya PBG, persyaratan pembangunan rumah atau gedung semakin sulit, karena masyarakat harus memenuhi persyaratan untuk bisa mendirikan bangunan.

“Dengan begitu saya khawatir, banyak masyarakat nantinya mendirikan rumah tidak memiliki izin yang akhirnya menjadi bangunan liar,” tuturnya.

“Menurut saya harus disesuaikan rendah menengah atas. Tujuannya supaya tidak memberatkan atau membebani masyarakat. Peraturan itu nanti akan berkesinambungan dengan kebijakan,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, jika harus menyamaratakan pengurusan perizinan PBG dengan ekonomi ke atas atau pihak tiga yaitu pengusaha, tentu saja

masyarakat menganggap akan kesulitan.

“Itu karena dibutuhkan perencanaan konsultan yang profesional,” katanya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mencontohkan bangunan yang berada di Jalan Ahmad Yani atau dikenal sepanjang tepian Teratai, di mana tidak ada perubahan satu pun titik letaknya. Sebab, jika bangunan tersebut harus diubah, izin bangunan itu bakal dikurangi bahkan mencapai 5 meter.

Karena itu, ia mengimbau OPD terkait agar harus melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu.

“Atau harus dilakukannya sosialisasi dahulu 2-3 bulan sebelum perencanaan dengan menggunakan masyarakat yang akan memakai, menyewa lahan atau aset-aset pemerintah daerah,” katanya.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin membangun bangunan sesuai prosedur PBG. “Karena mereka juga bayar kepada pemerintah daerah. Jangan terlalu memaksakan,” pungkasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Foto: Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

RUDI SOROT AIR BERSIH DI KECAMATAN SEGAH YANG DIKELUHKAN MASYARAKAT

TANJUNG REDEB - Masyarakat Kecamatan Segah mengeluhkan sumber air bersih mereka yang mulai tercemar. Hal itu menyita perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dia mengatakan, Kecamatan Segah merupakan salah satu sumber air bersih yang digunakan PDAM.

"Artinya, kalau masyarakat di Segah sudah mengeluhkan soal air bersih mereka, maka secara logika akan berdampak juga ke wilayah perkotaan," ungkapnya.

Menurutnya, jika kondisi air bersih di Tanjung Redeb sudah layak, maka yang harus diperhatikan oleh pihak terkait adalah wilayah penghasilnya.

"Tingkatkan pengelolaan air bersih di

wilayah sumbernya, jangan hanya terpusat di perkotaan saja, karena air bersih ini siapa pun membutuhkan," katanya.

Dirinya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memasukkan persoalan air bersih di Kecamatan Segah ke skala prioritas.

"Lebih bagus seluruh kecamatan dan kampung yang membutuhkan atau mengeluhkan air bersih diprioritaskan," tegasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyebut, air bersih merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

"Semoga segera ada tindak lanjutnya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan air bersih ini," tandasnya. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

SAKIRMAN DORONG PUSAT PENGGILINGAN PADI YANG MANGKRAK DITINDAKLANJUTI

TANJUNG REDEB – Mangkraknya pusat penggilingan padi di Kampung Sei Bebanir Bangun dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman membutuhkan perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dia mengatakan, sepahaman dirinya penggilingan padi tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Menurutnya sangat disayangkan jika mesin penggiling padi itu tidak berfungsi.

“Padahal itu bisa memudahkan petani. Tetapi nanti saya akan coba koordinasikan dengan OPD terkait,” katanya.

Dirinya mengaku pernah mempertanyakan keberadaan pusat penggilingan padi tersebut kepada petani Kampung Sei Bebanir Bangun.

“Mereka mengakui bahwa jika pusat penggilingan padi itu berfungsi akan mempermudah mereka,” tuturnya.

Menurut Sakirman, dengan adanya penggilingan padi tersebut, tentu para petani dapat memproduksi padi dengan kualitas premium.

“Mengenai pengelolaannya, seharusnya ada kelompok tani yang dibinia agar mesin tersebut berfungsi dengan maksimal,” ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ada pertemuan antara petani dengan OPD terkait. “Tujuannya untuk membahas solusi, supaya mesin tersebut bisa beroperasi kembali,” pungkasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



SUHARNO: SEGERA SOSIALISASIKAN PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TANJUNG REDEB – Dengan disahkannya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda didukung Wakil Ketua I DPRD Berau, Suharno.

Dia mengatakan, pajak dan retribusi merupakan nafas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau karena menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi hal ini sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemkab Berau dalam rangka memberikan pelayanan publik,” katanya.

Menurut Suharno, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru Serta penyederhanaan jenis retribusi.

“Yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah serta restrukturisasi pajak daerah dan

rasionalisasi retribusi daerah,” tambahnya.

Dijelaskannya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemkab Berau.

“Selain itu juga mendorong kemudahan berusaha iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah dan penciptaan lapangan kerja yang luas,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan Pemkab Berau untuk mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui sejak dini.

“Apalagi Raperda ini menyangkut pajak dan retribusi yang notabenenya merupakan kewajiban setiap lapisan masyarakat. Mereka harus mengetahui kemana uang yang mereka bayar selama ini, yaitu untuk membangun jalan maupun infrastruktur untuk masyarakat juga,” tandasnya. **(adv/dez)**



POLSEK BALIKPAPAN TIMUR GELAR REKONSTRUKSI KASUS PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN



**PENUMPANG DI BANDARA
SEPINGGAN TERCATAT CAPAI 3,8 JUTA
ORANG SELAMA SEPTEMBER 2023**



Rekonstruksi kasus penganiayaan berujung kematian yang di gelar Polsek Balikpapan Timur.

POLSEK BALIKPAPAN TIMUR GELAR REKONSTRUKSI KASUS PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN

BALIKPAPAN - Polsek Balikpapan Timur menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan M Matroji RT 83 PJHI Dalam Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur yang terjadi pada Kamis (31/8/2023) lalu. Di mana tersangkanya berinisial HA (56) dan korbannya Karsiyani (41).

Rekonstruksi yang dilaksanakan di Makopolresta Balikpapan pada Senin (9/10/2023) berlangsung sekitar pukul 11.30 Wita dan disaksikan oleh Jaksa, Kuasa Hukum dan pihak keluarga korban.

Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Timur, Ipda Hendik Winarko mengatakan, bahwa pelaksanaan rekonstruksi ini bertujuan untuk menyamakan hasil pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku.

"Reka adegan atau rekonstruksi ini agar perkara ini nantinya dalam penuntutan terag berderang. Sesuai barang bukti dan saksi-saksi," ujarnya.

Lebih lanjut Hendik Winar-

ko menjelaskan, rekonstruksi ini memperagakan sebanyak 20 adegan. Dan adegan inti aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku terjadi pada adegan ke 8 hingga 11.

"Sesuai keterangan pelaku, adegan 8 sampai 11 saat dia mencabut parang hingga menimpas korbannya," jelasnya.

Dari keseluruhan rekonstruksi yang ada, tidak ada adegan tambahan serta sesuai BAP pelaku dan saksi-saksi.

"Tentunya kita penyidik Polsek Balikpapan Timur sesuai fakta dan bukti yang ada yakni Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 338 KUH Pidana soal nanti mengarah pada Pasal 340 KUH Pidana soal pembunuhan berencana nanti menunggu petunjuk dari Kejaksaan," tambahnya.

Sementara itu perwakilan pihak korban yang dihadiri keluarga, meradang melihat rekonstruksi tersebut. "Awat kamu Hasan, sehat-sehat kamu di dalam ya, kutunggu memang

kamu di luar," ujar Mukhtar.

Usai rekonstruksi, Mukhtar mengatakan, jika pelaku harus dituntut hukuman yang berat. Pasalnya, korban setelah menjalani perawatan di rumah sakit akhirnya meninggal dunia.

"Kita minta keadilan. Di awal memang nggak keberatan karena masih hidup. Tapi ini korban sudah meninggal," jelasnya.

Mukhtar mengaku sempat berkomunikasi dengan korban, di mana saat korban mendatangi pelaku tidak ada niat sama sekali mengancam.

"Kan korban ini bilang kalau masalah ini nggak ada jalan keluarnya kita ke polisi aja biar jelas. Tapi kok pelaku ini sudah bawa parang dan menimpasnya," tambahnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat korban yang mengukur tanah ditegur oleh pelaku. Hingga akhirnya terjadi cekcok.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Penumpang di anjungan kedatangan menunggu bagasi mereka muncul di ban berjalan. (ANTARA/HO-API)

PENUMPANG DI BANDARA SEPINGGAN TERCATAT CAPAI 3,8 JUTA ORANG SELAMA SEPTEMBER 2023

BALIKPAPAN - Penumpang di Bandar Udara Internasional Sepinggan di Balikpapan hingga September 2023 mencatat 3,8 juta orang, dilayani 37.164 keberangkatan dan kedatangan pesawat.

"Kami tumbuh 41 persen untuk jumlah penumpang, dan 31 persen untuk pergerakan pesawat," kata General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Cabang Sepinggan Ahmad Syaugi Wahab, Senin (9/10/2023).

Angkasa Pura I adalah pengelola Bandara Sepinggan. Keberangkatan dan kedatangan pesawat disebut singkat sebagai pergerakan pesawat.

Pertumbuhan tersebut dihitung GM Syaugi dari jumlah penumpang tahun 2022 yang tercatat 2,7 juta orang lebih sampai akhir tahun dengan 28.460 pergerakan pesawat.

"Lonjakan trafik saat ini didorong oleh masyarakat yang saat ini sudah mulai kembali menjalankan aktivitas seperti perjalanan bisnis ataupun berwisata keluar daerah. Kemudian kami yakini juga sebab mulai awal tahun 2023 lalu Bandara Sepinggan meningkatkan konektivitas dengan membuka beberapa rute baru baik domestik maupun internasional," jelas GM.

Meskipun demikian, jumlah penumpang pada 2023 ini belum kembali seperti pada tahun 2019 atau sebelum Balikpapan turut terpapar wabah COVID-19. Ketika itu Bandara Sepinggan melayani penumpang sebanyak 5.429.716 orang dan pesawat udara sebanyak 59.125 pergerakan.

Mengingat tahun 2023 masih ada lebih kurang 3 bulan atau 100 hari lagi, Syaugi optimistis jumlah penumpang di akhir tahun nanti bisa mendekati angka di tahun 2019. Sama seperti banyak bandara lainnya, Bandara Sepinggan masih akan menghadapi musim liburan di mana orang akan banyak berpergian di bulan Desember. Pada Oktober dan November juga banyak perjalanan dinas dan perjalanan bisnis.

GM Syaugi menambahkan data lain. Tujuan atau destinasi penumpang dari Balikpapan terutama adalah ke Jakarta dengan 1.177.395 penumpang, Surabaya dengan 825.992 penumpang, Makassar dengan 348.989 penumpang, Yogyakarta dengan 281.891 penumpang dan Tarakan dengan 203.292 penumpang. (Ant/MK)

Pewarta : Novi Abdi
Editor : Sambas



Kedua orangtua bayi KC menunjukkan rekaman video cctv kekerasan ART terhadap anaknya.

SEMPAT LARI KE MAMUJU, ART ANIAYA BALITA 9 BULAN DI BALIKPAPAN DITANGKAP POLISI

BALIKPAPAN - Aksi kekerasan terhadap anak di bawah umur terjadi di Kota Balikpapan. Kali ini melibatkan seorang asisten rumah tangga (ART) serta anak yang berusia 9 bulan.

Orang tua anak berinisial KC, Nanda Adi Surya dan Putri Rachmadani mengatakan, kejadian tersebut bermula saat Putri (Ibu) memeriksa rekaman CCTV di kamar sang anak. Dalam video terlihat ART yang berinisial RI (37) telah menendang, menarik, dan membedong anak majikannya dengan kencang.

"Anak saya memang kesehariannya selalu sama istri. Kebetulan kemarin, utinya sedang nggak enak badan dan juga kebetulan yang asuh anak saya pertama itu pernah sama ART ini," ujar Nanda Adi Surya, Senin (9/10/2023).

Nanda menjelaskan, peristiwa kekerasan terhadap anaknya itu terjadi pada Senin, 25 September 2023. Di mana saat itu, anaknya ditiptkan kepada RI di rumah mereka di Balikpapan.

"Saat itu, istri saya ada kegiatan di luar rumah. Jadi, anak kami ditiptkan kepada ART. Ternyata, RI itu melakukan kekerasan kepada anak kami," tambahnya.

Hal itu diketahui pada malam harinya, Nanda dan istrinya melihat rekaman kamera pengawas. Pasalnya mereka sedikit heran lantaran KC tertidur lebih cepat. Dari salinan rekaman video CCTV, mereka terkejut melihat ART tersebut menganiaya anak mereka.

"Ada gerakan-gerakan yang mengarah ke kekerasan seperti menendang, mengaitkan

kaki ke kepala wajah, dan menarik pakaian," tegas Nanda.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, Nanda Adi dan istrinya langsung berkomunikasi dengan ART. Namun, ART mengakui perbuatannya tapi tidak meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Dia hanya bilang, 'Saya sadar', tapi tidak ada permintaan maaf yang serius," jelasnya.

Pada Rabu, 27 September 2023, Nanda Adi dan istrinya, Putri Rachmadani, melaporkan RI ke Polda Kalimantan Timur. Namun, RI tidak memenuhi panggilan polisi.

"Dia sudah keluar dari sini (rumah) dan mau pulang ke kampungnya. Tapi dia malah ke Mamuju," ujar Nanda lagi.

Pada Kamis 28 September 2023, Nanda Adi berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat, untuk mencari ART. Membawa bukti-bukti kekerasan yang dilakukan ART terhadap anaknya. Nanda Adi melaporkan ART ke Polres Mamuju pada Jumat (29/9/2023). Pada hari yang sama, ART ditangkap oleh polisi.

"Kami bersyukur bahwa ART akhirnya ditangkap dan dijemput polisi dari Polda Kaltim," tambahnya.

Nanda Adi berharap, pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia juga berharap, kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang untuk lebih berhati-hati dalam memilih ART.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anak-anak asyik memilih buku (ANTARA/HO-KPI)

PERTAMINA TRAKTIR 450 ANAK YATIM BELANJA BUKU DI BIG BAD WOLF

BALIKPAPAN - Pertamina mentraktir ratusan anak yatim dan anak dari keluarga dhua-fa membeli buku pada Bazar buku Big Bad Wolf di Dome Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kami ajak semuanya ada 450 orang Sabtu (7/10/2023) kemarin. Mumpung ada bazar buku, mumpung bazarnya di tempat lapang seperti Dome itu," kata Pejabat Sementara General Manager PT Kilang Pertamina Internasional (Pjs GM KPI) Unit Balikpapan Novie Handoyo Anto, di Balikpapan, Senin (9/10/2023).

Anak-anak itu dari 18 panti asuhan, 2 pesantren tahfidz (penghapal) Quran, dan 2 SMP. Juga turut diajak anak-anak dari keluarga Serikat Pekerja Nabab Bersatu (SPNB), dan Anak Ulin alias anak-anak asuh para pekerja KPI.

"Kegiatan ini sangat membantu kami mengadakan buku-buku untuk kegiatan membaca anak-anak," ujar pengurus Yayasan Darul Asri, Ari, yang mendampingi puluhan anak asuhnya.

Setiap anak mendapat voucher buku sebesar Rp300 ribu. Mereka dibebaskan memilih dan membeli buku apa saja. Dengan diskon harga buku sampai 90 persen, satu anak bisa menda-

ptkan minimal 3-4 buku.

"Cuma susah juga om, bukunya banyak berbahasa Inggris," kata Rahmat, satu dari anak-anak itu.

Big Bad Wolf memang bazar buku internasional. Yang dipajang di meja-meja bazar terutama buku-buku dari penerbit di luar negeri dan umumnya berbahasa Inggris. Misi Big Bad Wolf adalah agar buku-buku internasional tersebut, yang bila sudah melintasi batas negara menjadi mahal karena pajak, juga ongkos angkut, bisa menjadi relatif murah dan terjangkau harganya.

Untung saja Big Bad Wolf tahun ini menyediakan juga banyak buku dari penerbit-penerbit Indonesia. Ada buku-buku filsafat dan sejarah, juga sastra seperti buku-buku yang diterbitkan atau didistribusikan penerbit Mizan. Banyak juga novel untuk remaja.

"Karena itu kami melihat bazar buku ini kesempatan yang baik untuk menumbuhkan minat baca anak-anak. Setidaknya kesempatan jalan bareng bersama rekan-rekannya ke acara bazar buku akan jadi memori baik yang selalu dikenang," kata Handoyo Anto lagi.

Humas KPI Ely Chandra

Perangin Angin menambahkan, bahwa kegiatan tersebut adalah kerjasama antara perusahaan dengan Baituzzakah Pertamina (Bazma) dan donasi dari para pekerja.

"Program ini menjadi bukti bahwa dengan berkolaborasi, bekerja sama, kita akan mampu berbuat lebih banyak dan lebih besar. Total donasi yang disalurkan dalam kegiatan ini mencapai Rp122,7 juta dan lebih kurang 75 persen berasal dari donasi pekerja," ungkap Chandra.

Tidak hanya berdonasi, para pekerja Pertamina juga turut mendampingi anak-anak tersebut berkeliling melihat dan mencari buku yang menarik minat mereka. Lebih dari 20 pekerja terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

"Bersama mereka benar-benar memberi energi positif bagi kami. Menyenangkan untuk bisa berbagi, juga membahagiakan melihat mereka antusias memilih buku," kata Syarifuddin Husain, operator reaktor kilang yang libur khusus untuk turut mendampingi anak-anak tersebut. (Ant/MK)

Pewarta : Novi Abdi
Editor : Triono Subagyo



Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Capt Hatta Umar.

DPRD SEBUT FASILITAS PASAR SEPINGGAN PERLU RENOVASI

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan mengusulkan pasar tradisional Sepinggán, Balikpapan Selatan untuk dilakukan renovasi. Ini tampak terlihat dari kondisi sejumlah fasilitas yang ada di pasar Sepinggán sudah tidak layak. Bahkan pasar tradisional ini sudah lama tidak tersentuh perbaikan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Capt Hatta Umar mengatakan, kondisi sejumlah fasilitas yang ada di pasar Sepinggán sudah tidak layak. Maka pemerintah sudah saatnya mulai membahas anggaran perbaikan. Di mana hasil sidak ke pasar tersebut menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas. Seperti lantai pasar, dinding dan saluran drainasenya yang mampet.

"Banyak di situ yang harus dibenahi, termasuk lantainya. Saluran-salurnya sudah banyak yang mampet tidak lancar. Kami ingin ada informasi sejauh mana penanganannya di sana," ujarnya Senin (9/10/2023).

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, pemerin-

ta punya tanggung jawab melakukan renovasi ke pasar tradisional. Agar kondisi pasar yang ada dapat tertata rapih dan nyaman bagi pengunjung. Apalagi pasar Sepinggán merupakan satu-satunya pasar tradisional yang cukup besar yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan.

"Yang jelas, kami sudah sidak sejumlah pasar kami datangi khusus di Sepinggán banyak sekali yang harus dibenahi terutama lantainya sudah licin. Karena sudah lama tidak ada perbaikan," jelasnya.

Hatta meminta perhatian lebih pemerintah terhadap renovasi pasar tradisional. Mengingat hingga kini baru pasar Klandasan dan Pandan Sari yang mendapatkan anggaran perbaikan.

"Kalau hemat saya, kita perlu namanya kemajuan. Dalam arti pasar kita bisa dibuat menjadi pasar yang modern dan mewah. Tapi jangan juga meninggalkan kesan tradisional," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Apel pembukaan Pelatihan Potensi SAR di Permukaan Air (Water Rescue) di halaman Kantor SAR Balikpapan.

GELAR PELATIHAN WATER RESCUE, BASARNAS ANTISIPASI LAKA LAUT DI WILAYAH PERAIRAN IKN

BALIKPAPAN - Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A (SAR) Kota Balikpapan menggelar latihan Potensi SAR di Permukaan Air (Water Rescue), pada 9 - 14 Oktober 2023 mendatang.

Kepala Kantor SAR Balikpapan Melkianus Kotta mengatakan, pelaksanaan latihan water rescue sudah menjadi agenda rutin. Dan sebanyak 50 peserta dari unsur TNI-Polri, rekan hingga organisasi yang memiliki potensi SAR di seluruh Kaltim turut dilibatkan dalam pelatihan ini.

"Tahun ini kami sudah dua kali melaksanakan latihan water rescue. Yang pertama di Samarinda, kemudian hari ini di Balikpapan," ujarnya usai Apel Pembukaan Pelatihan Potensi SAR di Permukaan Air (Water Rescue) di halaman Kantor SAR Balikpapan.

Lebih lanjut Melkianus menjelaskan, pelatihan Potensi SAR khususnya di Permukaan Air (Water Rescue) ini sangat penting. Mengingat Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN dan juga PPU yang menjadi IKN terdapat akti-

vitasi di lautan.

"Kota Balikpapan ini sebagai penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), maka sangat dibutuhkan potensi SAR yang memiliki kemampuan lanjutan di bidang water rescue," jelasnya.

Sementara itu Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin yang membuka pelatihan tersebut sangat menyambut baik adanya pelaksanaan latihan water rescue Kantor SAR Balikpapan ini.

"Balikpapan ini wilayahnya banyak pantai, sehingga memang diperlukan potensi kesiapsiagaan seperti ini," ujar Muhaimin.

Kegiatan Pelatihan Potensi SAR di Permukaan Air (Water Rescue) yang dijalankan selama 6 hari dengan total jam pelajaran 72 JP. Dan pelaksanaan materi pembelajaran Water Rescue di laksanakan di ruang rapat Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan dan untuk kegiatan praktek dilaksanakan di Pantai Segara Sari Manggar, Balikpapan Timur.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



STADION GENTUNG TEMIANG DIINCAR JADI HOMEBASE PASER UNITED



**BAKESBANGPOL KABUPATEN PASER
MULAI GELAR DIKLAT INTELEJEN**



Stadion Gentung Temiang jadi kandang Paser United berkompetisi di Liga 3.

STADION GENTUNG TEMIANG DIINCAR JADI HOMEBASE PASER UNITED

PASER - Klub sepak bola amatir pendatang baru asal selatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Paser United menginginkan Stadion Gentung Temiang sebagai markas kesebelasan, di bawah naungan Askab PSSI Paser.

Ketua Askab PSSI Paser, Syahdan menyebut, pihaknya juga sudah mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk menggunakan fasilitas olahraga tersebut, untuk mempersiapkan diri pada kompetisi Liga 3 regional Kalimantan Timur (Kaltim).

"Secara resmi yang kita pinjam ke pemerintah daerah Stadion Gentung Temiang," kata Syahdan, Senin (9/10/2023).

Nantinya sebelum digunakan untuk kesebelasan yang dijuluki Laskar Segentar Bumi, lebih dulu dilakukan verifikasi kelayakan oleh Asprov PSSI Kaltim. Tentunya, hal ini bersifat peminjaman. Kendati begitu, hal ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Pemkab Paser akan sepak bola.

"Kami berharap stadion (Gentung Temiang) ini kedepannya lebih layak lagi. Ya, mudah-mudahan nantinya dapat digunakan

untuk main malam, bukan hanya sore," harap Syahdan.

Sekadar diketahui, Stadion Gentung Temiang yang berlokasi di Jalan Kesuma Bangsa, Kilometer 5, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot ini pembangunannya sejak 2013 lalu, dan rampung pada 2015. Namun pemanfaatannya barulah sekira 1 tahun terakhir ini.

Pasalnya, di Kabupaten Paser selain Stadion Gentung Temiang juga ada Stadion Sadurengas. Nama terakhir ini intens digunakan untuk berbagai gelaran, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi Kaltim.

Stadion Gentung Temiang baru mulai dimanfaatkan satu terakhir ini karena belum adanya penyerahan aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser.

Sehingga disinyalir menjadi kendala untuk dimanfaatkan, terlebih jika menyangkut tanggung jawab pemeliharaan ke depannya. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disporapar Kabupaten Paser, Arief Rahman mengatakan penyer-

ahan telah dilakukan sekira September lalu.

"Dalam hal ini secara resmi sudah diserahkan ke Disporapar selaku pengguna barang untuk memanfaatkannya lebih lanjut," ucap Arief, sapaan karibnya.

Alasan memilih Stadion Gentung Temiang untuk kandang Paser United, karena saat ini Stadion Sadurengas di Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot sedang dilakukan perawatan atau pemeliharaan untuk gelaran Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) November mendatang.

Disinggung perihal sewa stadion yang kerap dilakukan klub profesional, Arief menuturkan sejauh ini belum sampai pada pembahasan atau pola tersebut. Katanya, Pemkab Paser masih sebatas meminjamkan kepada Paser United. Namun tak menutup kemungkinan ke depannya diberlakukan harga sewa, tentunya lebih dulu dilakukan kajian.

"Sampai saat ini belum ke arah sana (sistem sewa), silakan dimanfaatkan dulu. Nanti seperti apa, masih kita carikan polanya," tandasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Tim mini soccer SMP Negeri 2 Batu Engau juara satu Disdikbud Cup 1 Paser menyambut Haornas 2023.

SAMBUT HAORNAS 2023, DISDIKBUD KABUPATEN PASER GELAR TURNAMEN VOLI DAN MINI SOCCER

PASER - Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2023 yang jatuh pada 9 September 2023 lalu, diperingati oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser dengan menggelar lomba olahraga khusus tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ada dua lomba digelar, yaitu Mini Soccer dan Bola Voli. Dari 76 SMP di Kabupaten Paser, animo pelajar sangat tinggi mengikuti lomba yang bekerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (MGMP PJOK) itu.

Total ada 50 tim putra dan putri mengikuti lomba Bola Voli tingkat pelajar SMP sederajat, dan 52 tim putra putri untuk lomba Mini Soccer. Puncaknya final Mini Soc-

cer kemarin ditonton banyak dari para pelajar dan orangtua murid.

Tim putri SMP 1 Tanah Grogot berhasil menjadi juara satu Mini Soccer, dan Tim Putra SMP 2 Batu Engau menjadi juara satu di kategori putra. Sementara di Voli, tim putri SMP 7 Long Kali juara satu, dan SMP 8 Long Ikis putra juara satu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser, M Yunus menyampaikan ada 6 ribu lebih siswa SMP di Kabupaten Paser. Disdikbud Kabupaten Paser sangat apresiasi seluruh peserta yang tampil dalam perlombaan menyambut Haornas ini.

"Karena ada piala bergilir, berarti akan rutin diagendakan setiap tahun. Kita naikan angga-

rannya tahun depan kalau bisa untuk hadiah pemenang," kata Yunus.

Disdikbud akan terus berupaya meningkatkan kreativitas siswa, salah satunya dengan mengadakan lomba. Tahun depan akan ditambah cabang olahraga (cabor). Lainnya seperti Pickle Ball dan Bola Basket. Pelaksanaan pertandingan ini sejak 2 - 8 Oktober 2023.

Ini adalah kali pertama Disdikbud Cup 1 digelar menyambut Haornas, animo tiap sekolah dan orangtua murid sangat besar, sehingga Disdikbud akan berencana kembali melanjutkan di tahun depan dengan skema piala bergilir tiap cabor.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Pelaksanaan Diklat Intelejen FKDM Kabupaten Paser

BAKESBANGPOL KABUPATEN PASER MULAI GELAR DIKLAT INTELEJEN

PASER- Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam mengantisipasi potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan Diklat Intelejen pada Senin (9/10/2023).

Pada kegiatan tersebut, diikuti 61 peserta yang terdiri dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dari setiap Kecamatan se-Kabupaten Paser. Pada forum tersebut segenap lembaga Intelejen daerah memaparkan materi berkaitan dengan intelejen.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Kesra Romif Erwanadi. Disampaikan, pelaksanaan Diklat Intelejen tersebut berdasarkan pada Permendagri 46 tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

"Sebagai tindak lanjut Pemerintah terhadap Permendagri, maka dari itu kami membentuk FKDM mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat desa,"

ucap Romif Erwanadi. Senin

Dengan dilaksanakannya diklat tersebut, diharapkan mampu mendeteksi secara dini berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Keamanan di Kabupaten Paser.

"Pendektesian secara dini bisa dilakukan dengan cara memberikan laporan serta rekomendasi kepada pimpinan guna mengambil kebijakan terkait ATHG," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser. Nonding menyampaikan, setiap permasalahan di lingkungan masyarakat bisa saja berpotensi pada ATHG.

"Sebenarnya setiap orang sudah memahami berbagai potensi gangguan ATHG, tapi masih belum bisa membuatnya dalam bentuk laporan kepada pimpinan, makanya dalam forum ini seluruh peserta dilatih bersama," ucap Nonding.

Kegiatan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan selama dua hari hingga Selasa (10/10). Pada hari pertama seluruh peserta dikenalkan dengan materi berkaitan dengan intelejen. Sementara itu, pada hari kedua akan dilaksanakan praktek lapangan.

"Lembaga intelejen yang ada di Kabupaten Paser pada hari pertama akan memaparkan materi berkaitan dengan intelejen, pada hari kedua seluruh peserta akan praktek di lapangan," jelasnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Paser. Sehingga Pemerintah Kabupaten Paser dapat melakukan pencegahan dan antisipasi dini terhadap setiap konflik di lingkungan masyarakat.

"Semoga semua bisa berjalan dengan baik, supaya Kabupaten Paser bisa tetap kondusif," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA BPSDM KALTIM DIIKUTI 60 PESERTA





Kiri Dra Nina Dewi MAP saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana

PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA BPSDM KALTIM DIIKUTI 60 PESERTA

SAMARINDA - Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam penanggulangan bencana, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Pelatihan Dasar Manajemen Bencana pada Senin (9/10/2023), di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim, Apriyana Rachmawati mengatakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana diikuti oleh 2 angkatan berjumlah 60 peserta selama 4 hari secara klasikal (tatap muka).

"Jumlah peserta 60 orang terdiri dari 30 orang di Angkatan 1, dan 30 orang di Angkatan 2 yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan Bencana di Provinsi Kaltim," ujarnya.

Melalui pelatihan ini dapat meningkatkan Kapasitas SDM dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti yang tertuang dalam PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Disebutkan, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi terjadi bencana.

"Selama mengikuti pelatihan, peserta juga diwajibkan untuk menyampaikan evaluasi terhadap materi, pelaksanaan dan fasilitator," pintanya.

Dalam sambutan sekaligus membuka

acara, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengatakan pentingnya manajemen bencana tidak dapat diabaikan.

"Di seluruh dunia, kita sering kali dihadapkan pada berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga bencana buatan manusia seperti kecelakaan industri," ujar Nina.

Oleh sebab itu menurut Nina, mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan

yang tepat dalam manajemen bencana adalah langkah yang bijak untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat.

"Dengan ini Pelatihan Dasar Manajemen Bencana secara resmi saya buka," ujar Nina.

Diketahui, narasumber Pelatihan Dasar Manajemen Bencana kali ini, berasal dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, dan Widyaiswara BPSDM Kaltim.

Selain peserta acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno, Kepala BPBD, Agus Tianur, Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Agus Rubiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU, Riviana Noor, Pejabat Administrator, Widyaiswara, Pejabat Pengawas dan Analis Bangkom di Lingkungan BPSDM Kaltim (ADV).

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), Dyayadi, saat diwawancarai Mediakaltim.com beberapa waktu lalu

PENTINGNYA DIGITALISASI PENGARSIPAN DATA PRIBADI DEMI KEAMANAN

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Samarinda (Kaltim) mengimbau kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan masyarakat akan pentingnya digitalisasi dalam memanfaatkan teknologi sebagai solusi digital dalam pengarsipan.

Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), Dyayadi mengungkapkan, digitalisasi arsip adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi hilangnya data dan arsip berharga akibat bencana alam.

"Sekarang kita harus memanfaatkan teknologi. Arsip pribadi dan arsip penting yang dikelola perangkat daerah, harus di-scan menjadi bentuk digital. Antisipasi misal terjadi kebakaran, banjir, yang bisa mengakibatkan arsip hilang atau terbakar," terangnya saat ditemui Mediakaltim.com di Kantor Arsip Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Dyayadi juga mengatakan bah-

wa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di lingkungan Kaltim disarankan untuk menyimpan arsip-arsip penting dengan baik dan untuk arsip statis bisa disimpan di DPKD Kaltim. Misalnya, seperti surat-surat tanah kepemilikan gedung pemerintah dan surat-surat penting lainnya yang tidak sering digunakan agar tidak hilang dan jika dibutuhkan bisa menarik kembali berkasnya untuk digunakan.

Dikatakan, warga Samarinda juga dapat memanfaatkan teknologi ini agar menjaga keamanan berkas penting mereka, seperti ijazah, sertifikat, surat tanah, dan dokumen lainnya.

"Para ASN dan masyarakat saya mengimbau, untuk mengamankan berkas-berkas vitalnya. Dengan cara di-scan, lalu unggah ke Google Drive, kan bisa itu agar nanti kalau mau mencari kembali mudah, mencarinya," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Mualimin. (Istimewa)

DINKES KALTIM : BERIKAN BAYI ASI EKSKLUSIF GUNA CEGAH STUNTING

SAMARINDA- Pemberian ASI (air susu ibu) eksklusif selama enam bulan pertama merupakan salah satu upaya dalam pencegahan bayi stunting. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin.

"ASI eksklusif artinya bayi hanya mendapatkan ASI tanpa tambahan susu atau makanan lain, termasuk susu kental manis yang tidak baik untuk kesehatan bayi," ungkap Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Senin (9/10/2023).

Ia juga menjelaskan, ASI sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

"ASI mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, miner-

al, dan zat untuk kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit," ujarnya.

Sehingga, Jaya mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Selain itu, juga mengimbau para calon pengantin untuk mengikuti sekolah calon ibu. Karena para calon ibu akan mendapatkan ilmu tentang cara menyusui yang benar, manfaat ASI, dan cara mengatasi masalah dalam menyusui.

"ASI eksklusif adalah investasi masa depan bagi anak kita," tutup Jaya. (nta/adv, Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah.

GELAR GERAKAN LITERASI INFORMASI, DPK SAMARINDA AKAN KUNJUNGI SEKOLAH DAN KELURAHAN

SAMARINDA - Demi meningkatkan pengetahuan literasi informasi di kalangan masyarakat yang tersebar di kota Samarinda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda akan gelar gerakan Literasi Informasi di sekolah dan di kelurahan.

Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah mengatakan target gerakan literasi informasi menyasar 10 tempat yang ada di Samarinda. Sementara itu baru-baru ini, gerakan pertama sudah dilakukan oleh DPK Kota Samarinda di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

"Baru-baru ini kita sudah menggelar di Perpustakaan Kelurahan Bukuan, jadi sisa 9 tempat lagi. Pada Oktober ini berjalan lagi dan November targetnya selesai," bebernya.

Nurhikmah mendefinisikan literasi informasi itu adalah memahami masyarakat bagaimana mencari mengakses dan memanfaatkan informasi itu dengan benar.

"Salah satu contoh literasi informasi itu misalkan mencari buku bacaan di perpustakaan, kita harus faham soal jenis buku, ada buku sejarah, sastra, ensiklopedi, kamus bahasa Inggris dan buku lainnya. Setelah itu bagaimana cara memanfaatkan ilmu pengetahuannya," jelasnya.

Saat ini banyak siswa-siswi dan masyarakat tidak mengetahui apa itu literasi dan literasi informasi. Oleh sebab itulah pihaknya menggelar gerakan literasi informasi.

Nurhikmah menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke perpustakaan sekolah-se-

kolah, banyak sekali dia temui murid yang belum mengerti cara menggunakan kamus. Ini merupakan salah satu hal contoh ketidaktahuan anak-anak soal bagaimana memahami literasi informasi soal buku kamus tersebut.

"Banyak masih anak-anak itu belum mengetahui cara membaca Kamus Bahasa Inggris, karena kan ada kata imbuhan dan kata kerja," ujarnya.

Bahkan ketika DPK Kota Samarinda melaksanakan gerakan literasi informasi di perpustakaan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran beberapa waktu lalu, masyarakat yang hadir banyak yang tidak tahu mengenai aplikasi penunjang bacaan masyarakat. Misalnya, seperti iKaltim yang dikeluarkan pemerintah provinsi, juga iSamarinda yang dikeluarkan oleh DPK Kota Samarinda.

"Kita datang ke Bukuan kemarin masyarakat itu banyak yang nggak tahu kalau ada aplikasi iKaltim dan iSamarinda," ungkapnya.

Gerakan literasi informasi ini juga bertujuan agar masyarakat dapat menghalau informasi-informasi yang tidak benar seperti hoax, dengan cara menggali kebenaran informasi.

"Jadi setiap informasi masyarakat harus mencari kebenarannya, dengan mengakses situs berita-berita yang kredibel atau mengakses situs Kominfo untuk menggali informasi yang didapat ini benar atau hoax. Jadi nggak main langsung share beritanya," pungkasnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pelatihan PKMN tingkatkan kualitas pelayanan ibu dan bayi baru lahir. (istimewa)

PELATIHAN PKMN BAGI NAKES, UPAYA TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pelatihan penanganan kegawatdaruratan bagi dokter umum, bidan dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Berau sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

"AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hasil survei penduduk antara sensus (SUPASI) 2015, AKI di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Jumat (6/10/2023).

Menurut Jaya, salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi adalah komplikasi yang terjadi pada saat masa kehamilan, persalinan dan nifas.

Komplikasi tersebut dapat dicegah dan ditangani bila tenaga kesehatan mampu

melakukan identifikasi dini, memberikan pertolongan pertama, melakukan tindakan stabilitas pasien, dan merujuk ke rumah sakit bila perlu.

"Untuk itu, kami mengadakan pelatihan PKMN yang komprehensif dan tepat sasaran bagi tenaga kesehatan di Fasyankes primer dari Kabupaten Berau," ujarnya.

Ditambahkan Jaya, pelatihan ini meliputi teori dan praktik tentang penggunaan partograf, manajemen aktif kala II, resusitasi neonatus, pencegahan infeksi, dan rujukan efektif.

Ia berharap pelatihan PKMN tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Berau.

"Kami mengapresiasi kerjasama antara Dinas Kesehatan Kaltim dengan Balai Pengembangan Pendidikan Kesehatan (Bapelkes) Samarinda dalam penyelenggaraan pelatihan ini," pungkasnya.

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Sekda Kota Samarinda Hero Mardanus membuka kick off kegiatan vaksinasi Rabies Massal Gratis dalam peringatan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia di halaman Museum kota Samarinda. ANTARA/HO-Diskominfo Samarinda

PEMKOT SAMARINDA SIAPKAN 5 RIBU DOSIS VAKSIN RABIES GRATIS

SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyiapkan 5.000 dosis vaksin rabies gratis kepada masyarakat Kota Samarinda yang ingin memvaksin hewan peliharaannya.

Sekda Kota Samarinda Hero Mardanus Satiyawan menekankan pentingnya mengatasi wabah zoonosis, seperti penyakit rabies yang masih ada di Kota Samarinda.

"Pemerintah Kota Samarinda telah berkomitmen untuk memberantas penyakit menular, salah satunya rabies secara tuntas, sehingga Kota Samarinda bebas dari rabies pada tahun 2028," kata Hero Mardanus dalam keterangan di Samarinda, Minggu (8/10/2023).

Pada kesempatan itu, Sekda Hero Mardanus melakukan kick off kegiatan vaksinasi Rabies Massal Gratis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam peringatan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia di halaman Museum Kota Samarinda.

Hero mengharapkan kerja sama semua pihak, kerja sama lintas sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Samarinda serta peran aktif dari masyarakat dalam memerangi penyakit Rabies.

"Mari kita bersama-sama dalam persatuan untuk bisa memberantas penyakit rabies

dengan harapan agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan" kata Hero Mardanus menyampaikan pesan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Muhammad Darham mengatakan rabies merupakan salah satu virus mematikan yang menyebar ke manusia melalui air liur hewan yang terinfeksi.

Ia menjelaskan rabies biasanya menyebar melalui gigitan hewan seperti anjing, kelelawar, anjing hutan, rubah, sigung, dan rakun.

"Bagi mereka yang terinfeksi virus ini membutuhkan diagnosis medis, biasanya dengan gejala meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental," katanya.

Darham berharap masyarakat Kota Samarinda ikut berpartisipasi memberantas penyakit rabies dengan membawa hewan peliharaannya ke klinik yang dirujuk untuk vaksinasi gratis rabies.

"Peringatan Hari Rabies Sedunia yang kali ini mengangkat tema All For One, One Health For All melakukan kampanye global untuk memerangi penyakit rabies, dengan tujuan menjadikan dunia bebas penyakit rabies tahun 2030," kata dia. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto

Editor : Bambang Sutopo Hadi



Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin. (Antaraneews Kaltim/Fandi)

DINKES KALTIM SIAPKAN LAYANAN KONSELING KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN POSYANDU

SAMARINDA - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan layanan konseling kesehatan kepada masyarakat melalui fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas dan pos pelayanan terpadu (posyandu).

"Layanan konseling ini sangat penting untuk mencegah dan menangani masalah kesehatan mental, seperti depresi dan stres," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Minggu (8/10/2023).

Jaya menyebutkan faskes tingkat pertama memiliki ruang konseling yang bisa memberikan bantuan psikologis kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan keluarga dan reproduksi.

"Kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DKP3A) untuk mengintegrasikan layanan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Puspaga)," ujarnya.

Ia menambahkan, layanan konseling di faskes tingkat pertama akan menjadi layanan unggulan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut dia, jika ada kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka faskes ting-

kat pertama akan merujuk pasien ke rumah sakit yang memiliki psikolog dan dokter jiwa.

"Salah satu rumah sakit yang kita rekomendasikan adalah Rumah Sakit Atma Husada, yang memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang memadai untuk menangani masalah kesehatan mental," katanya.

Dengan adanya layanan konseling ini, ia berharap masyarakat bisa lebih sehat secara fisik dan mental.

Jaya mengakui pihaknya belum memiliki data resmi mengenai angka bunuh diri yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun, ia mengaku prihatin dengan adanya beberapa kasus bunuh diri khususnya di sejumlah jembatan yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan bunuh diri," ucapnya.

Salah satu caranya, kata dia, dengan memasang jaring kawat di jembatan-jembatan yang rawan menjadi lokasi bunuh diri.

"Kita juga akan meningkatkan literasi kepada masyarakat tentang bahaya bunuh diri dan cara mengatasinya," kata Jaya. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto

Editor : Bambang Sutopo Hadi



Deputi Kepala BI Kaltim Muhamad Rais (Antara / HO BI Kaltim)

BI KALTIM GELAR SUMMER FESTIVAL 2023, TUMBUHKAN RASA CINTA RUPIAH

SAMARINDA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) menggelar kunjungan untuk Sekolah Unggul Membangun Makna Edukasi Rupiah atau (SUMMER) Festival 2023 ke sejumlah daerah, untuk menumbuhkan rasa cinta, bangga dan paham rupiah.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim Muhamad Rais di Samarinda, Minggu (8/10/2023), menyampaikan bahwa SUMMER Festival 2023 melibatkan pelajar SMA/ sederajat di tiga daerah, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini merupakan upaya BI untuk mendukung pendidikan melalui kegiatan edukasi dan memberikan tantangan bagi pelajar agar tetap produktif melalui kompetisi yang positif dan kreatif sebagai perluasan komunikasi dan tentang cinta, bangga, dan paham (CPB) rupiah.

Untuk kegiatan di Samarinda telah digelar 1 Oktober, di Bontang 7 Oktober, dan sebagai rangkaian terakhir, BI Kaltim akan menggelar kegiatan Road to SUMMER Festival 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 15 Oktober 2023.

"Di Kota Bontang, telah digelar di SMAN 1 Bontang. Kegiatan diikuti 116 pelajar dan 20 guru pendamping dari sekolah. Road to SUMMER Festival ini digelar dalam bentuk lomba-lomba antarsekolah, yakni tentang

CPB rupiah serta kebanksentralan," kata Rais.

Summer Festival 2023 berisi berbagai lomba seperti jingle CBP rupiah, mural CBP rupiah, mading 3D CBP rupiah, dance CBP rupiah, storytelling CBP rupiah, serta cerdas cermat CBP rupiah dan kebanksentralan.

"Seluruh lomba memiliki bobot masing-masing dan hanya tiga sekolah dengan poin tertinggi yang masuk ke final Summer Festival," katanya lagi.

Adapun perlombaan diikuti 10 sekolah di Bontang yaitu SMA Negeri 3, SMA Negeri 1, SMA IT Daarul Hikmah, SMA Yayasan Pendidikan Vidya Dahana Patra, SMKN 1 Bontang, SMA YPK, SMKN 2 Bontang, SMA Tunas Bangsa Bontang, SMK IT Bani Abdurrahman, SMA Bahrul Ulum.

Berdasarkan hasil lomba, Juara Umum 1 Kota Bontang adalah SMA Yayasan Pendidikan Vidya Dahana Patra, sedangkan SMA Negeri 1 Bontang menjadi Juara Umum 2, dan SMKN 1 BONTANG berada di peringkat ketiga.

"Sebelumnya, kegiatan Road to SUMMER Festival ini juga digelar di Kota Samarinda, tepatnya di Gedung Kantor BI Kaltim pada 1 Oktober. Adapun 3 sekolah yang lolos dari Kota Samarinda adalah SMAN 2 Samarinda, SMAK SF Assisi Samarinda, dan SMA N 11 Samarinda," katanya. (Ant/MK)

Pewarta : M.Ghofar

Editor : Sambas



Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Mualimin. (Media Kaltim)

REMBUK STUNTING, TINGKATKAN SINERGITAS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rembuk stunting tingkat provinsi tahun 2023 untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka stunting di wilayah setempat.

"Kami melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021," kata Jaya, di Hotel Mercure, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, dinas terkait dalam penanganan stunting yakni Dinas kesehatan Kaltim, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Tanaman Pangan.

Ia menjelaskan, dalam rembuk stunting itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim. Dinas kesehatan Kaltim berlaku sebagai koordinator untuk Tim Pengendali Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (TPPS) yang berkoordinasi dengan kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.

Salah satu intervensinya adalah sensitif terhadap lingkungan, rumah sehat layak huni yang disana ada sanitasi yang baik, ketersediaan air yang menjadi urusan dari Dinas PUPR.

Kemudian, terkait keluarga yang harus dibantu melalui program keluarga harapan harus punya kartu BPJS yang menjadi urusan Dinas Sosial. Untuk pemberian makan bergizi, diupayakan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan.

"Selain itu ditekankan juga pentingnya kesadaran ibu menggunakan ASI eksklusif dan melaksanakan pola asuh yang baik bagi anaknya," ungkap Jaya.

Jaya pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DKP3A) bersama BKKBN, dengan program Sekolah Calon Pengantin, Sekolah Ibu Hamil, dan Pusat Pembelaan Keluarga (Puspaga).

"Semua dinas terkait dirangkul dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kaltim dalam konvergensi penanganan program," ujarnya.

Kemudian, program intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kaltim, antara lain pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan minimal empat kali bagi ibu hamil, pemberian vitamin A bagi anak-anak, dan pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami kekurangan energi kalori atau MPASI.

"Ketika ibu melahirkan harus memberikan ASI selama 24 bulan kemudian imunisasi dasar lengkap bagi anak," imbuhnya.

Menurut Jaya, beberapa program intervensi spesifik lainnya terkait anak yakni melakukan timbang berat badan dan diukur tinggi badan serta dipantau setiap bulan dan dilaporkan di TPPS.

"Tadi sudah dilibatkan data yang terintegrasi bisa kita lihat sebulan sekali melalui data geospasial, kita bisa melihat bayi lokasinya dimana dan posyandunya apa," pungkasnya. (Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Foto : kucing peliharaan juga wajib melakukan vaksin untuk cegah penyakit zoonosis. (Istimewa)

BAHAYA PENYAKIT ZONOSIS, JAYA MEMINTA HEWAN PELIHARAAN DIVAKSIN

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersinergi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim melakukan vaksinasi rutin agar masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis.

"Kami mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing.

Sedangkan untuk penularan zoonosis, dapat menular melalui tiga cara yaitu langsung, tidak langsung, dan konsumsi.

"Beberapa penyakit zoonosis itu, yakni rabies, antraks, dan leptospirosis," ujarnya.

Dinkes Kaltim tengah menggenapkan vaksinasi terhadap anjing liar dan hewan peliharaan lainnya, guna menjadikan wilayah tersebut bebas dari penyakit rabies.

"Kami pastikan anjing liar divaksin karena mereka berpotensi menularkan

rabies kepada manusia," kata Jaya.

Kendati demikian, hewan peliharaan lainnya pun wajib divaksinasi termasuk kucing. Karena kucing jika terkena rabies juga bisa menyebabkan gejala yang sama dengan anjing. Dan hewan lainnya juga perlu mendapatkan vaksin adalah kerbau.

Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk segera membersihkan luka gigitan hewan dengan air mengalir dan sabun.

"Jangan sampai virus rabies masuk ke dalam tubuh. Segera periksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti rabies," ucapnya.

Jaya meminta masyarakat yang memiliki hewan peliharaan sebagai binatang kesayangan dan merawatnya dengan baik. Vaksin untuk hewan peliharaan disediakan secara gratis seperti yang dilakukan untuk sapi dan kerbau.

"Di Kaltim, ada penyakit zoonosis lain yang berasal dari sapi dan kerbau, yaitu anthrax. Kita sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk penyakit zoonosis," pungkasnya. (Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



OK! TOBER

Deluxe Room

ONLY

~~Rp 698.000,-~~**30% OFF**

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs**BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com